

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERBASIS
MASYARAKAT DI KELURAHAN LOA BUAH
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA**



OLEH:

TIRA AGUSTINUS
NPM:2263201023

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2026

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERBASIS
MASYARAKAT DI KELURAHAN LOA BUAH
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA**



OLEH:

TIRA AGUSTINUS
NPM: 2263201023

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Nama Mahasiswa : Tira Agustinus

NPM : 2263201023

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

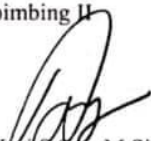
Samarinda, 13 April 2026

Mengetahui

Pembimbing I

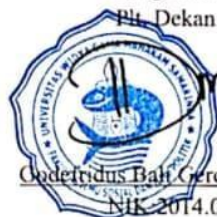

Drs. Said Zulkifli, M.Si
NIDN:1109075801

Pembimbing II


Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIDN:1106118701

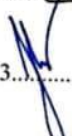
Mengetahui

Plt. Dekan


Codefridus Bah Geroda, S.Pd., M.pd.
NIK 2014.087.167

Penguji

1. Drs. Said Zulkifli, M.Si
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
3. Muhammad Habibi, S.Sos., M.Kesos

1. 
2. 
3. 

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tira Agustinus

NPM : 2263201023

Judul Skripsi :

"Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda".

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah laporan yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 13 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Tira Agustinus
2263201023

RINGKASAN

TIRA AGUSTINUS, Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda di bawah bimbingan Drs. Said Zulkifli, M.Si dan Ahmad Yani, S.Sos.,M.Si.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan program bantuan sosial dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di tingkat kelurahan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti keterbatasan kewenangan kelurahan, kurangnya kejelasan informasi, serta adanya persepsi masyarakat terkait ketepatan sasaran bantuan. Kelurahan sebagai pelaksana di tingkat lokal memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program bantuan sosial dilaksanakan di lapangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program bantuan sosial di Kelurahan Loa Buah serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program bantuan sosial berdasarkan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yaitu indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak kelurahan, ketua RT, dan masyarakat penerima maupun non-penerima bantuan sosial. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan makna terhadap temuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial di Kelurahan Loa Buah telah berjalan sesuai prosedur, namun masih terdapat beberapa kendala. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui koordinasi kelurahan dan RT, meskipun belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat. Dari aspek sumber daya, kelurahan memiliki keterbatasan kewenangan dan jumlah aparatur. Dari aspek disposisi, sikap pelaksana dinilai cukup baik, namun masih terdapat perbedaan pandangan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial karena pihak kelurahan berperan sebagai pelaksana dalam penyerahan bantuan sosial. Dari aspek struktur birokrasi, alur pelaksanaan sudah jelas terutama dalam proses penyaluran tetapi bersifat hierarkis. Faktor pendukung meliputi koordinasi antar lembaga dan dukungan masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan kewenangan, informasi, dan persepsi ketidaktepatan sasaran bantuan.

Kata kunci: Bantuan Sosial, Implementasi, Masyarakat

RIWAYAT HIDUP



TIRA AGUSTINUS, lahir di Desa Punan Gong Solok, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada tanggal 2 April 2004 merupakan anak kedua dari empat bersaudara Ayah bernama Agustinus Lungu dan Ibu Irawati Njuk.

Memiliki saudara laki-laki yang merupakan anak pertama bernama Hendri Apria Agustinus, anak ketiga bernama Reva Tina dan anak keempat bernama Karina Agustinus. Pada tahun 2010 mulai memasuki Sekolah Dasar Negeri 006 Malinau Selatan Hilir dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 mulai memasuki Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Malinau Selatan Hilir dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 memasuki Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Malinau dan lulus pada tahun 2022.

Kemudian pada tahun 2022 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik. Selanjutnya pada bulan Agustus 2025 peneliti melakukan Kegiatan Kuliah Nyata (KKN) selama satu bulan di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan semua pihak dalam hal pemenuhan data, bimbingan, dan doa dari semua pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan pembinaan kepada seluruh mahasiswa.
2. Bapak Godefridus Bali Geroda, S.Pd., M.pd selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dan mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Drs. Said Zulkifli, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Ahmad Yani, S. Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Habibi, S.Sos.,M.Kesos selaku dosen penguji ahli yang telah memberikan saran serta mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada peneliti selama mengikuti masa perkuliahan.
8. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah melalui Program Beasiswa Desa Sarjana di Kabupaten Malinau yang telah memberikan dukungan berupa bantuan beasiswa kepada peneliti selama menempuh pendidikan, bantuan yang diberikan sangat berarti bagi peneliti dalam menempuh pendidikan baik dari segi pembiayaan dan motivasi untuk terus belajar dan berprestasi. Semoga program ini terus berlanjut dan dapat dipertahankan agar membantu generasi muda dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta berkontribusi bagi pembangunan daerah.

9. Bapak Budi Hartono, S.Sos selaku Lurah Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan dan penelitian.
10. Seluruh pegawai dan masyarakat Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda yang telah membantu dalam memberikan informasi dan data yang peneliti perlukan serta memberikan saran kepada peneliti.
11. Kepada kedua orang tua tercinta Ayah Agustinus Lungu dan Ibu Irawati Njuk, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta semangat yang tiada hentinya diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada saudara dan saudari peneliti, Kakak Hendri Apria agustinus, adik Reva Tina, adik Karina Agustinus, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada peneliti.
13. Kepada mama Alberta Tuto mama angkat peneliti terima kasih atas dukungan doa, motivasi, semangat dan kebersamaan yang diberikan kepada peneliti dalam menulis skripsi ini.
14. Kepada saudari kakak angkat peneliti Dominika Welin Karang terima kasih atas segala dukungan, doa, waktu, kebersamaan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini semoga kedepanya kita saling mendukung dan saling menguatkan.

15. Kepada teman terdekat peneliti Eman, Karen, Chris, Fery, dan Edil, yang sudah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini dan terima kasih atas kebersamaan yang sudah kita jalani suka duka sudah kita lalui bersama.

16. Kepada ketiga sahabat peneliti Bulan, Marianthi, Marcelina yang senantiasa bersama peneliti dari SMA hingga sekarang yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dikala peneliti menyusun skripsi terima kasih atas kebersamaan nya semoga kita selalu bersama dan selalu saling mendukung satu dengan yang lain.

17. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 kelas A FISIPOL yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan, dukungan, dan motivasi diberikan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, dan akan di berkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Samarinda, 13 April 2026



Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
RINGKASAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORI.....	14
2.1 Teori dan Konsep.....	14
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	16
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.1.4 Syarat Implementasi	19
2.1.5 Model Implementasi Kebijakan Publik	20
2.1.6 Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan Publik	24
2.2 Pengertian Bantuan Sosial	27
2.2.1 Prinsip Penyelenggaran bantuan sosial.....	28
2.2.2 Landasan hukum bantuan sosial	29
2.2.3 Dampak bantuan sosial	31
2.2.4 Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jadwal Penelitian.....	35
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	38

3.4 Definisi Konsepsional.....	39
3.5 Fokus Penelitian	40
3.5 Sumber Data	41
3.6.1 Data Primer.....	42
3.6.2 Data Sekunder.....	44
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.8 Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.2 Tugas pokok dan Fungsi Kelurahan	54
4.3 Visi dan Misi Kota Samarinda.....	55
4.4 Keadaan Sumber Daya Manusia	56
4.5 Struktur Organisasi.....	64
4.6 Penyajian Data Hasil Penelitian	66
4.6.1 Komunikasi.....	66
4.6.1 Sumber Daya.....	68
4.6.3 Disposisi / Sikap Pelaksana	70
4.6.4 Struktur Birokrasi	73
4. 7 Pembahasan.....	75
4.7.1 Komunikasi.....	75
4.7.2 Sumber Daya.....	76
4.7.3 Disposisi.....	77
4.7.4. Struktur Birokrasi	78
4.8 Faktor Pendukung dan Penghambat	79
4.8.1 Faktor Pendukung.....	79
4.8.1 Faktor penghambat	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerima Bantuan Pangan Bulog.....	6
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Perbatasan Wilayah.....	52
Tabel 4.2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	57
Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Tetangga.....	58
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	60
Tabel 4.6 Sarana Prasarana.....	61
Tabel 4.7 Pekerjaan / Mata Pencarian.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif.....	49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Loa Buah.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan sosial merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan adanya program bantuan sosial tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bantuan sosial ini sangat penting dan dibutuhkan terutama di daerah-daerah yang memiliki banyak warga yang rentan secara ekonomi.

Kemiskinan dan kerentanan sosial masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia dengan kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat yang dikatakan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar khususnya kebutuhan pangan. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan dasar pangan pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui bantuan pangan bagi kelompok yang kurang mampu. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah menugaskan Perum Bulog sebagai badan usaha milik negara yang berperan dalam pengelolaan dan distribusi pangan.

Penugasan Perum Bulog dalam mendukung program bantuan pangan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional yang memberikan kewenangan kepada Bulog untuk menyalurkan pangan kepada masyarakat termasuk dalam program bantuan sosial. Bantuan pangan ini dikenal oleh masyarakat sebagai bantuan sosial Bulog yang bertujuan membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok.

Dalam pelaksanaannya penyaluran bantuan sosial pangan juga menetapkan pada kebijakan terbaru pemerintah terkait pendataan penerima bantuan. Pemerintah saat ini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penggunaan DTSEN serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial dan meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Oleh sebab itu negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang mengalami risiko sosial.

Berdasarkan ketentuan mengenai Bansos yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial atas perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Bantuan Sosial diartikan sebagai bantuan berupa barang, uang, atau jasa bagi individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial. Hal ini sejalan pula dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Berdasarkan Permensos Pasal 2 ayat (1) No.4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako, program-program ini bertujuan untuk :

- a) Mengurangi beban pengeluaran KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar;
- b) Memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial; dan
- c) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Selain adanya tujuan, dalam Permensos ini juga dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) terkait dengan manfaat pemberian bantuan sembako diantaranya adalah:

- a) Ketahanan pangan di tingkat KPM Program Sembako sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;

- b) Menggerakkan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan bahan pangan; dan
- c) Pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

Permensos Pasal 24 tentang Program Sembako, menjelaskan bahwa (1) Untuk melaksanakan Program Sembako diperlukan koordinasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a) Direktorat yang menangani Program Sembako;
- b) Bank/Pos Penyalur;
- c) Dinas Sosial daerah provinsi; dan/atau
- d) Dinas Sosial daerah kabupaten/kota.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagai salah satu peran utama yang bertanggung jawab dalam memastikan kelancaran implementasi Program Sembako di tingkat daerah. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan kabupaten/kota, Dinas Sosial Kota Samarinda wajib melaksanakan fungsi koordinatif sebagaimana diamanatkan Permensos, termasuk dalam hal pendataan, verifikasi, validasi, pemutakhiran data penerima manfaat, pengawasan penyaluran melalui *e-warong* atau agen penyalur, serta penyampaian laporan kepada pemerintah pusat melalui jalur koordinasi resmi. Dengan dasar hukum tersebut, Pemerintah Kota Samarinda termasuk hingga tingkat kelurahan tidak memiliki kewenangan menetapkan penerima atau bentuk bantuan, tetapi berfungsi mendukung pelaksanaan program agar tepat sasaran sesuai regulasi nasional yang berlaku.

Kelurahan Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang merupakan salah satu wilayah di Kota Samarinda dengan beragam keadaan sosial ekonomi mayoritas warganya bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil, sehingga banyak keluarga masih memerlukan dukungan dari bantuan sosial. Pemerintah kelurahan serta RT memiliki peranan penting dalam pengawasan, verifikasi, dan penyaluran bansos agar berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Pelaksanaannya program bantuan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, dan masyarakat dimana dalam pelaksanaan yang mengutamakan partisipasi masyarakat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program agar masyarakat turut berperan langsung dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan berdasarkan kondisi sosial ekonomi di lingkungannya.

Meskipun demikian dalam pelaksanaannya program bantuan sosial di berbagai daerah sering menghadapi berbagai permasalahan salah satu persoalan yang sering di hadapi adalah ketidaktepatan sasaran penerimaan bantuan, di mana masih ditemukan masyarakat yang seharusnya berhak belum menerima bantuan sementara mereka yang tergolong mampu justru mendapatkan bantuan.

Tabel. 1.1 Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Okt-Nov 2025 RT 11-15 Kelurahan Loa Buah

No	Nama Penerima	Jumlah Bantuan
1	Agus Batan	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
2	Agus Salim	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
3	Alen Prama Arta Simangunsong	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
4	Antoni	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
5	Asnah	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
6	Bintang Permadani	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
7	Farida	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
8	Gatot Margono Putra	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
9	Grista Delvi Tulak	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
10	Hadibah	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
11	Halifah	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
12	Hamlinah	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
13	Jahrawati	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
14	Kustiani	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
15	Lisa Masruroh Arika	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
16	Lusiana Musa Tandi	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
17	Maisya Afni	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
18	Mariyam	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
19	Marlik	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
20	Mastiah	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
21	Mega Ulfa Novi Yanti	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
22	Muhammad Ridwan	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
23	Muhammad Abduh	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
24	Nurlailah	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
25	Nurtinah	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
26	Nurkolis	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
27	Patih Bunni Baia	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
28	Qotijah	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
29	Rani Fatimah	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
30	Raisyah	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
31	Restu Novia Dewi	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
32	Rusdiansyah	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L

Bersambung ...

Sambungan Tabel 1.1

33	Samsiah	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
34	Sarti	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
35	Siti Khotimah	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
36	Sumiati	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
37	Supiyati	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
38	Yuliana Sesa	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
39	Wiwi Wati	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L
40	Triyati	Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 L

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa terdapat 40 (empat puluh) warga yang tercatat sebagai penerima bantuan pangan Perum Bulog pada alokasi Oktober–November 2025 di wilayah RT 11–15 Kelurahan Loa Buah. Setiap penerima memperoleh bantuan dalam bentuk beras sebanyak 20 kilogram dan minyak goreng sebanyak 4 liter. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan dasar masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Data tersebut menunjukkan bahwa program bantuan sosial telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan daftar penerima yang telah ditetapkan. Namun demikian, keberadaan data penerima bantuan ini juga menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut terkait dengan ketepatan sasaran, proses verifikasi, serta mekanisme pendataan yang digunakan dalam penetapan penerima manfaat. Hal ini mengingat bahwa dalam pelaksanaan program bantuan sosial sering ditemukan permasalahan seperti ketidaksesuaian data atau adanya masyarakat yang seharusnya berhak tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan.

Dengan demikian, penyajian data penerima bantuan ini menjadi dasar awal bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat di Kelurahan Loa Buah, khususnya ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam proses penyaluran bantuan.

Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda yang merupakan salah satu wilayah penerima dan pelaksana Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan terlihat bahwa adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan, pelaksanaan program bantuan sosial yang ada di wilayah tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana peneliti hanya sebatas menduga adanya ketidaktepatan sasaran penerimaan bantuan sosial namun ini hanya sebatas menduga adanya permasalahan tersebut karena belum dilakukan penelitian secara mendalam untuk membuktikan kebenarannya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian akan diarahakan. Masalah adalah suatu persoalan yang memerlukan jawaban atas persoalan tersebut dan pemecahannya dalam usaha mencapai tujuan.

Dalam hal ini, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang disusun secara terstruktur, jelas, dan mendetail mengenai batasan masalah yang berperan sebagai panduan utama dalam pelaksanaan penelitian.

Menurut Sugiyono (2020:56) mengatakan bahwa “Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang jawabannya akan diperoleh melalui proses pengumpulan data. Bentuk rumusan masalah tersebut disusun dan dikembangkan sesuai dengan jenis penelitian, terutama berdasarkan tingkat penjelasan (eksplanasi) yang ingin dicapai dalam penelitian”.

Menurut Kerlinger (2016:138) mengemukakan “Masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih yang akan diteliti, sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami keterkaitan antar variabel tersebut.

Menurut Winarno Surakhmad (2017:15) “Masalah merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat tercapai atau dengan kata lain adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi”.

Berdasarkan pendapat dari para ahli dapat peneliti disimpulkan yaitu bahwa rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang disusun oleh peneliti untuk mencari jawaban melalui pengumpulan data rumusan masalah tersebut muncul karena adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi, serta biasanya berkaitan dengan hubungan antara variabel yang akan diteliti

dengan adanya rumusan masalah ini menjadi dasar dan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian agar tujuan penelitian dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan sebagai arahan pada proses penelitian. Menurut Sugiyono (2020:290) mengemukakan bahwa “Tujuan penelitian secara umum adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan dan secara khusus dalam penelitian kualitatif, tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Menurut Surkadi (2018:111) mengatakan bahwa “Tujuan penelitian merupakan upaya untuk memperoleh sesuatu yang baru dan asli yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dapat muncul di tengah masyarakat. Menurut Nyoman Kutha Ratna yang dikutip oleh Rulam Ahmadi (2016:154) mengemukakan “Tujuan penelitian dapat diartikan sebagai hal atau hasil yang ingin dicapai oleh penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan pandangan menurut para ahli dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh peneliti melalui kegiatan penelitian. Tujuan tersebut berkaitan dengan upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan, serta memperoleh hal baru yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat tujuan penelitian juga sebagai arah dan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda?
2. Untuk Mengidentifikasi Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyaluran Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran Kepada Masyarakat?

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan bisa memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktik, sehingga hasilnya tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan ilmu tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Sugiyono (2020:397) mengatakan bahwa “Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian kualitatif, manfaat yang lebih diutamakan adalah manfaat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, meskipun manfaat praktisnya tetap ada dan tidak diabaikan. Menurut Kaelan (2015:235) mengatakan “Suatu penelitian harus

memberikan manfaat yang jelas bagi kehidupan manusia, baik manfaat praktis, teoritis, maupun normatif oleh sebab itu, peneliti harus mampu menunjukkan manfaat tersebut secara nyata dan menjelaskan kaitannya dengan kehidupan manusia”.

Menurut Rifa'i B. Abu (2020:10) mengatakan “Penelitian dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum diketahui, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori maupun praktik di berbagai bidang”.

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa manfaat penelitian merupakan kontribusi yang diberikan oleh penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian bermanfaat untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan secara praktis penelitian bermanfaat untuk membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia karena itu, setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas dan nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan kontribusi pada pembangunan kajian ilmu administrasi publik.

- b. Untuk menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi program bantuan sosial berbasis masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah Kelurahan maupun pihak terkait dalam memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, adil, dan tepat sasaran.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan evaluasi serta dorongan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program bantuan sosial.

- c. Bagi Peneliti Memberikan pengalaman, wawasan, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan publik di tingkat Kelurahan.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Teori dan Konsep

Secara umum penelitian ilmiah menggunakan teori yang menjadi unsur dan sangat penting sebagai dasar atau sebagai landasan berpikir secara ilmiah, oleh karena itu sangat diperlukan maksud dan tujuan keberadaan teori dan konsep dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2020:54) mengatakan bahwa “Dalam melakukan penelitian ilmiah, peneliti harus menggunakan teori dan konsep yang sesuai sebagai dasar dan pedoman teori tersebut membantu peneliti dalam memahami masalah yang diteliti dan menjelaskan hubungan antara variabel yang ada dalam penelitian.

Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2020:117) mengemukakan bahwa “Teori adalah kumpulan pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian secara teratur dan sistematis”. Menurut Lexy J. Moleong (2018:57) mengatakan “Teori merupakan kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didasarkan pada fakta yang dapat diamati, yang digunakan untuk menjelaskan dan memperkirakan suatu fenomena yang terjadi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat peneliti simpulkan adalah bahwa teori teori merupakan kumpulan pernyataan atau konsep yang digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penelitian untuk menjelaskan suatu fenomena teori membantu peneliti dalam memahami masalah, menjelaskan hubungan antara variabel, serta memberikan gambaran tentang fenomena yang diteliti berdasarkan

fakta yang dapat diamati dan teori juga berfungsi untuk membantu peneliti dalam menjelaskan dan memperkirakan suatu kejadian secara sistematis.

Menurut Harbani Pasolong (2017:77) mengatakan “Konsep merupakan gambaran yang bersifat abstrak tentang suatu fenomena yang disusun berdasarkan kesamaan karakteristik dari berbagai kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Konsep digunakan sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian”. Menurut Muhammad Idrus (2019:17) mengatakan “Konsep adalah istilah dan pengertian yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala secara abstrak, seperti kejadian, keadaan, atau kelompok tertentu”.

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2019:8) “Konsep digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan suatu gejala sosial atau gejala alam yang bersifat abstrak konsep juga merupakan bentuk generalisasi dari beberapa gejala yang memiliki kesamaan, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai gejala yang sejenis”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan suatu gagasan atau pemikiran yang bersifat abstrak yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala, kejadian, atau keadaan berdasarkan kesamaan tertentu. Konsep membantu peneliti dalam memahami dan menggambarkan fenomena yang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih jelas dan terarah.

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep yang merangkum segala keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan beberapa definisi kebijakan publik oleh beberapa pendapat para ahli. Menurut Thomas R. Dye dalam Achmad (2024:1) mengatakan “Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai bentuk pilihan dalam menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan begitu menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan hasil tindakan pemerintah untuk merespon kebutuhan masyarakat”.

Menurut Lengkai (2020:42) mengatakan “Kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk program-program yang kemudian dilaksanakan melalui berbagai kegiatan atau proyek kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Budi Winarno (2017:16) mengatakan bahwa “Kebijakan publik merupakan suatu program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, nilai-nilai, dan praktik yang dilakukan secara terarah”. Menurut Peter Woll dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2018:2) mengemukakan “Kebijakan publik adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk program atau kegiatan yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu

dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kebijakan publik juga dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri maupun melalui kerja sama dengan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat dan solusi bagi kepentingan masyarakat.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau tindakan dari rencana yang telah disusun dengan baik dan rinci dalam pelaksanaan dilakukan setelah rencana tersebut siap untuk dijalankan secara sederhana implementasi merupakan proses penerapan dari suatu rencana yang telah dibuat.

Menurut Budi Winarno (2017:70) mengatakan bahwa “Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menyesuaikan dan menyelaraskan berbagai aktivitas yang saling berkaitan sehingga menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya sekadar kegiatan biasa, tetapi merupakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan secara terarah dan sesuai dengan aturan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Husaini Usman (2016:70) mengemukakan “Implementasi adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan atau program yang telah direncanakan sebelumnya pelaksanaan tersebut dilengkapi dengan berbagai kebutuhan seperti siapa yang melaksanakan, di mana pelaksanaan dilakukan, alat yang digunakan, serta bagaimana cara pelaksanaannya implementasi juga merupakan rangkaian kegiatan lanjutan agar program atau kebijakan dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang telah direncanakan sebelumnya melalui serangkaian kegiatan yang terarah dan terstruktur. Implementasi tidak hanya berupa tindakan tetapi juga melibatkan langkah-langkah, mekanisme, serta pihak-pihak yang terlibat agar tujuan dari kebijakan atau program tersebut dapat tercapai dengan baik.

2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Beberapa pendapat para ahli menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Hadari Nawawi (2017:131) mengatakan “Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu, pejabat, organisasi pemerintah, maupun pihak swasta untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.

Selain itu, menurut Hadari Nawawi (2017:131) mengatakan bahwa “Karakter atau sifat dari kebijakan yang dilaksanakan sangat mempengaruhi proses implementasi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu adanya pengawasan (kontrol), perubahan yang mungkin terjadi, serta kepatuhan dari pihak yang melaksanakan kebijakan”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat peneliti simpulkan yaitu Implementasi kebijakan merupakan implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan keberhasilan

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sifat kebijakan itu sendiri, serta adanya pengawasan, penyesuaian, dan kepatuhan dari pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut agar tujuan dapat tercapai dengan baik.

2.1.4 Syarat Implementasi

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Implementasi menjadi tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan, karena suatu kebijakan tidak akan memberikan hasil apabila tidak dilaksanakan dengan baik oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan diperlukan agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Abdul Wahab (2017:70) menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- a. Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Kondisi lingkungan dan sikap masyarakat mendukung serta tidak menimbulkan hambatan yang berarti.
- c. Kegiatan yang dilaksanakan memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dan dapat dipahami.
- d. Tersedianya waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai.
- e. Adanya hubungan kerja sama antar pihak yang terlibat.

- f. Proses pelaksanaan tidak terlalu panjang dan memiliki hubungan yang jelas.
- g. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat.
- h. Tugas dan tanggung jawab dijelaskan secara rinci dan disusun secara teratur.
- i. Adanya pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai tujuan kebijakan.
- j. Pihak yang memiliki wewenang mampu mengawasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar implementasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai, komunikasi dan koordinasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta adanya kerja sama dan kepatuhan dari pihak yang terlibat. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

2.1.5 Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan merupakan tindakan untuk mengubah keputusan atau kebijakan menjadi kegiatan nyata yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh lembaga publik sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk perubahan kecil maupun perubahan yang lebih besar sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah dibuat. Menurut Gion (dalam indahono 2017:45), terdapat beberapa variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan model implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Kemampuan kebijakan dalam mengatur proses implementasi, termasuk kejelasan bentuk dan isi kebijakan sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan.
- b. Kemampuan organisasi pelaksana, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya seperti anggaran, tenaga pelaksana, dan dukungan lain yang dapat menunjang keberhasilan implementasi.
- c. Pengaruh lingkungan masyarakat, seperti motivasi masyarakat, karakteristik masyarakat, hubungan sosial, serta pola komunikasi yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan, kemampuan organisasi pelaksana, serta dukungan dari lingkungan masyarakat. Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi, maka kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980:10-11) dalam Deddy Mulyadi (2015:30) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik komunikasi berfungsi sebagai sarana

untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan kepada para pelaksana kebijakan agar mereka memahami tugas, tanggung jawab, dan tujuan yang harus dicapai. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas, tepat, dan sesuai oleh pelaksana kebijakan kemudian dengan adanya komunikasi yang baik harus memenuhi beberapa unsur, yaitu kejelasan informasi, ketepatan isi pesan, dan konsistensi dalam penyampaian. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka pelaksana kebijakan dapat mengalami kesalahpahaman, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh karena itu, komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, wewenang, dan fasilitas sumber daya manusia berkaitan dengan jumlah dan kemampuan pelaksana kebijakan, sedangkan sumber daya keuangan berkaitan dengan ketersediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program. Adapun unsur-unsur sumber daya meliputi:

a. Staf

Staf merupakan pelaksana utama dalam implementasi kebijakan keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh jumlah staf yang cukup serta kemampuan dan keterampilan yang dimiliki staf yang kompeten akan mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Informasi

Informasi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya informasi yang jelas akan membantu pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Wewenang

Wewenang merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dengan adanya wewenang, pelaksana kebijakan memiliki kekuatan hukum untuk menjalankan tugasnya, sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara resmi dan sah.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fasilitas yang memadai akan mempermudah pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya, tanpa fasilitas yang cukup kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan dan disposisi sangat penting karena keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pelaksana, tetapi juga oleh kemauan dan kesungguhan mereka dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Ada beberapa hal penting dalam disposisi antara lain:

a. Pengangkatan Birokrat

Pemilihan pelaksana kebijakan harus dilakukan dengan baik, yaitu memilih orang yang memiliki kemampuan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pelaksana yang memiliki sikap yang baik akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

b . Insentif

Insentif merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan dimana pemberian insentif dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja pelaksana, sehingga mereka dapat melaksanakan kebijakan dengan lebih baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi yang melaksanakan kebijakan yang baik akan mempermudah koordinasi, kerja sama, dan pembagian tugas antar pelaksana kebijakan, struktur birokrasi yang tidak jelas dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan serta struktur birokrasi yang baik harus memiliki pembagian tugas yang jelas, sistem kerja yang teratur, serta koordinasi yang baik antar bagian engan begitu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.6 Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang dilakukan setelah tujuan dan sasaran kebijakan disetujui melalui keputusan resmi. Pada tahap ini, kebijakan mulai dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka dapat segera

dilakukan tindakan perbaikan agar kebijakan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan tahapan-tahapan yang jelas agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif.

Menurut M. Irfan Islamy (2017:102) mengatakan “Implementasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. *Self-executing*, yaitu kebijakan yang dapat berjalan dengan sendirinya setelah ditetapkan dan disahkan, tanpa memerlukan tindakan pelaksanaan tambahan. Contohnya adalah pengakuan kedaulatan suatu negara oleh negara lain.
2. *Non self-executing*, yaitu kebijakan yang pelaksanaannya memerlukan tindakan nyata dari berbagai pihak agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Artinya, kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait.

Selanjutnya, menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Solichin Abdul Wahab (2017:36) mengemukakan implementasi kebijakan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Perencanaan

- a). Menjelaskan rencana kegiatan secara rinci agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- b). Menentukan standar atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- c). Menentukan anggaran dan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, kegiatan mulai dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti staf, prosedur kerja, biaya, serta metode yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Pengawasan

- a). Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b). Melakukan pemantauan terhadap jalannya kegiatan.
- c). Melakukan pengawasan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan setelah kebijakan disahkan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan implementasi kebijakan dapat terjadi secara langsung dengan sendirinya atau melalui tindakan dari pihak-pihak yang terkait dan implementasi kebijakan juga melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan dengan adanya tahapan-tahapan tersebut pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terarah, terkontrol, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2.2 Pengertian Bantuan Sosial

Menurut Hartini Retnaningsih (2020:219), bantuan sosial merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin maupun masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan terhadap berbagai risiko sosial. Bantuan sosial ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan terlantar dengan tujuan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan mereka dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, bantuan sosial diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil. Tujuan dari bantuan tersebut adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga mereka tidak semakin terpuruk dalam kondisi kemiskinan atau masalah sosial lainnya. Secara umum, bantuan sosial dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu atau sedang mengalami kesulitan. Bantuan sosial tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, karena menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui bantuan sosial, pemerintah berupaya

membantu masyarakat agar dapat hidup dengan layak, terlindungi dari risiko sosial, serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih baik.

2.2.1 Prinsip Penyelenggaraan bantuan sosial

Penyelenggaraan bantuan sosial pada dasarnya mengikuti pedoman prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan ketepatan sasaran. Prinsip-prinsip ini sangat penting agar pemberian bantuan sosial dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial tidak hanya sekedar sebagai alat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dari kesulitan ekonomi dan sosial.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial, semua aktivitas terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial, harus dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip keadilan sosial, tidak diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa setiap individu yang berhak menerima bantuan harus diperlakukan secara setara tanpa memedulikan latar belakang sosial, etnis, agama, atau kelompok.

Menurut Suharto (2014:57) menyatakan bahwa prinsip pokok dalam pelaksanaan bantuan sosial adalah memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan dapat membantu mereka mencapai kemandirian. Oleh karena itu, bantuan sosial harus bisa lebih dari sekadar

memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga mendorong penerima untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya di masa depan. Bantuan yang bersifat amal, seperti pemberian uang tunai atau bahan pokok, sebaiknya diimbangi dengan dukungan yang produktif, seperti pelatihan keterampilan atau modal usaha, agar penerima tidak terus-menerus bergantung pada bantuan dari pemerintah.

Dengan demikian, pelaksanaan bantuan sosial juga memerlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Pemerintah pusat berperan dalam merumuskan kebijakan dan alokasi anggaran, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan di tingkat lokal agar bantuan dapat disalurkan secara tepat. Masyarakat juga perlu dilibatkan, baik sebagai penerima maupun pengawas, untuk menjamin bahwa bantuan disalurkan dengan cara yang transparan dan tidak disalahgunakan.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan bantuan sosial tidak hanya fokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada proses pengelolaan yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan dalam penyaluran dan tanggung jawab dalam pelaporan menjadi hal yang sangat penting agar program bantuan sosial berjalan dengan baik serta benar-benar mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh masyarakat.

2.2.2 Landasan hukum bantuan sosial

Landasan hukum ialah dasar yang memberikan kekuatan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan publik, termasuk dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Menurut Suartini (2023:215) mengatakan “Landasan hukum merupakan

dasar yang memberikan kekuatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik termasuk kebijakan bantuan sosial pelaksanaan bantuan sosial di Indonesia harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara dan mekanisme penyalurannya, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Menurut Ardha (2022:31), landasan hukum dalam kebijakan bantuan sosial berfungsi untuk menjamin akuntabilitas dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Adanya peraturan yang jelas sangat penting agar pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat yang rentan, terutama dalam kondisi tertentu seperti bencana atau situasi darurat. Selanjutnya, menurut Sari (2023:1) mengatakan “setiap program bantuan sosial harus memiliki dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum sebagai bentuk perlindungan sosial dengan adanya dasar hukum yang kuat, pelaksanaan bantuan sosial dapat dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip kesejahteraan masyarakat”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum merupakan dasar yang sangat penting dalam pelaksanaan bantuan sosial. Landasan hukum berfungsi untuk memberikan kekuatan, pedoman, dan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan, serta menjamin agar bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, pemerintah dapat melaksanakan program bantuan sosial secara terarah dan sesuai dengan tujuan untuk melindungi dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

2.2.3 Dampak bantuan sosial

Bantuan sosial memiliki dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat miskin yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Anggrasari (2022:225), bantuan sosial dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta membantu memperbaiki kondisi kesejahteraan rumah tangga miskin. Selain itu, bantuan sosial juga berperan dalam menjaga kondisi sosial tetap stabil karena dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan secara tepat juga dapat mendorong penerima menjadi lebih mandiri, misalnya melalui bantuan usaha atau pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka.

Namun, bantuan sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Menurut Widyarini (2023:142) menjelaskan bahwa “Bantuan sosial dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, sehingga dapat mengurangi semangat untuk bekerja dan berusaha secara mandiri jika pendataan dan penyaluran bantuan tidak tepat dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, seperti kecemburuan di antara masyarakat karena adanya penerima yang tidak sesuai kriteria. Halim dan Muhammad (2023:117) juga menyatakan bahwa “Kurangnya pengawasan dan transparansi dapat menyebabkan penyalahgunaan bantuan atau adanya manipulasi data penerima, sehingga tujuan bantuan sosial tidak tercapai secara maksimal”.

Dengan demikian bantuan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan bantuan sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketergantungan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu pelaksanaan bantuan sosial harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan disertai dengan program pemberdayaan agar masyarakat dapat menjadi mandiri dan tujuan bantuan sosial dapat tercapai secara optimal.

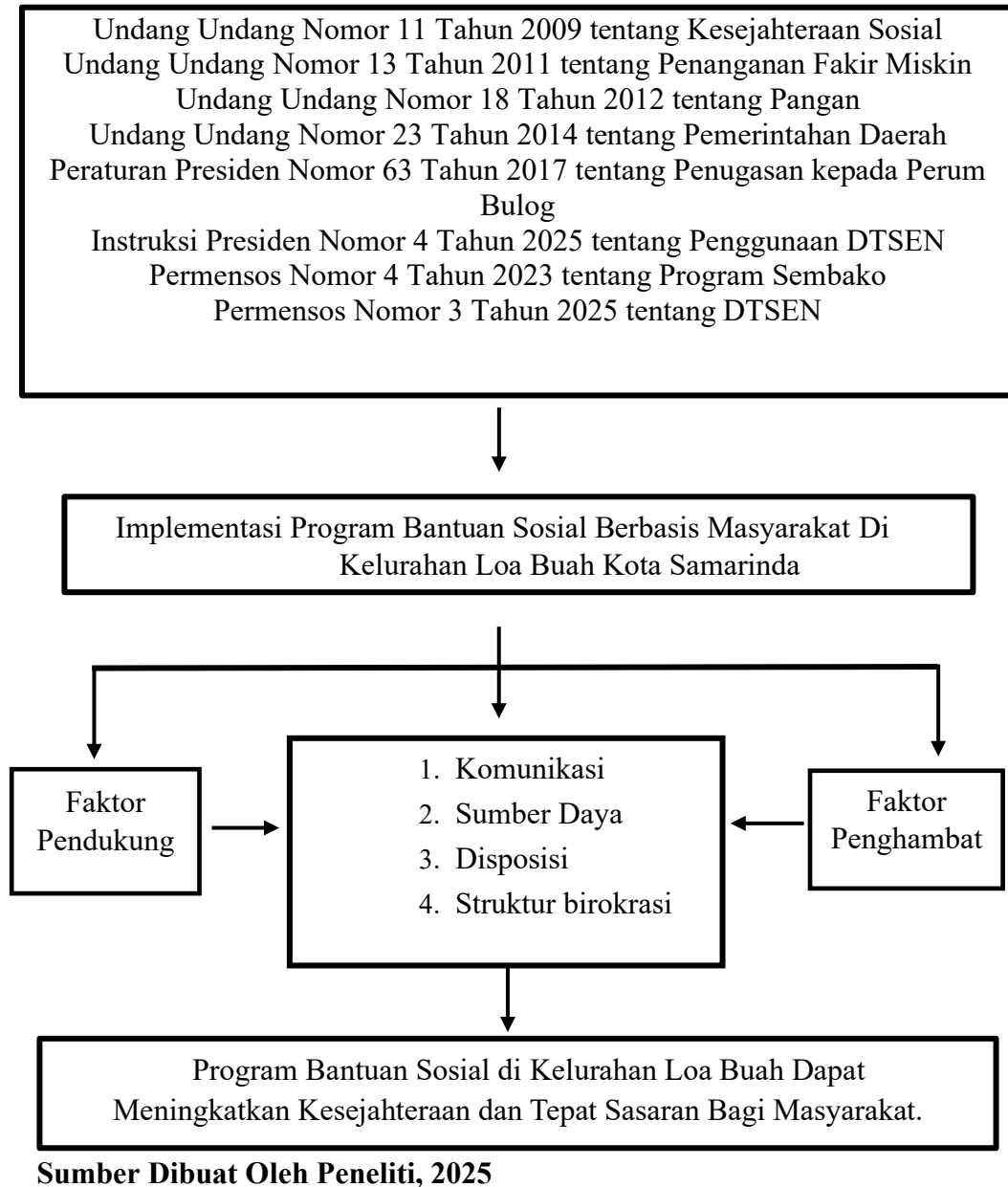
2.2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan bagian penting dalam penelitian yang digunakan sebagai dasar oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2017:60) mengatakan bahwa “Kerangka berpikir adalah gambaran konseptual yang menunjukkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian kerangka berpikir membantu peneliti memahami keterkaitan antara teori dan masalah yang diteliti”. Menurut Ibrahim (2018:45) megatakan “Kerangka konseptual penelitian merupakan gambaran menyeluruh mengenai suatu penelitian yang memuat berbagai unsur penting seperti permasalahan yang diteliti, aspek-aspek yang berkaitan, serta kemungkinan hasil yang ingin dicapai dari proses penelitian tersebut sehingga kerangka konseptual menggambarkan alur dan arah penelitian secara keseluruhan”. Dan menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2015:60) mengatakan “Kerangka berpikir adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan faktor-faktor penting yang diteliti. Kerangka berpikir menjadi dasar utama dalam memahami penelitian

karena berfungsi sebagai landasan dan pedoman bagi peneliti dalam menjalankan seluruh proses penelitian”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerangka pikir merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori, permasalahan, dan aspek-aspek yang diteliti, serta menjadi dasar dan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian kerangka pikir berfungsi untuk memberikan arah yang jelas agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan perencanaan yang baik karena perencanaan menjadi pedoman dalam setiap tahap penelitian. Dengan adanya jadwal penelitian, peneliti dapat mengatur waktu dengan baik sehingga seluruh kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Menurut Sujarweni (2014:73) mengatakan bahwa “Waktu penelitian adalah waktu pelaksanaan penelitian yang meliputi tanggal, bulan, dan tahun penelitian dilakukan di dalam penelitian terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, baik sebelum maupun setelah penelitian di lapangan, dan semua tahapan tersebut saling berhubungan”.

Menurut Sugiyono (dalam Andi Prastowo, 2016:47) menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan dan memahami suatu fenomena secara mendalam”.

Selanjutnya, Stainback (dalam Andi Prastowo, 2016:48) menyatakan bahwa “Tidak ada ketentuan pasti mengenai lamanya penelitian kualitatif pada umumnya penelitian dilakukan dalam waktu yang cukup lama, tergantung pada kondisi sumber data, tujuan penelitian, luasnya penelitian, serta kemampuan peneliti dalam mengatur waktu penelitian”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa waktu penelitian adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan penelitian dan menjadi pedoman bagi peneliti. Lamanya waktu penelitian, khususnya penelitian kualitatif, tidak dapat ditentukan secara pasti karena tergantung pada tujuan penelitian, kondisi di lapangan, dan kemampuan peneliti dalam mengatur waktu.

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian								
	2025					2026			
	Keterangan	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Observasi								
2.	Pengajuan Judul								
3.	Penyusunan Skripsi								
4.	Penelitian Lapangan								
5.	Seminar Hasil								
6.	Ujian Pendadaran								

Sumber: dibuat oleh peneliti, 2025

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif metode ini dipilih karena dapat membantu peneliti menggambarkan dan memahami suatu fenomena secara lebih jelas dan mendalam. Dengan adanya metode ini peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan. Menurut Moleong (2018:11) mengatakan “Penelitian kualitatif mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang diperoleh tersebut sangat penting karena dapat membantu menjelaskan dan memahami masalah yang diteliti”. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Andi Prastowo, 2016:15) menyatakan bahwa “Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati langsung dari subjek penelitian”.

Menurut Sugiyono (2015:347) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi yang alami dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data dianalisis secara kualitatif hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada membuat kesimpulan umum.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat peneliti simpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dengan menggunakan data berupa kata-kata, perilaku, dan dokumentasi penelitian dilakukan secara langsung di lapangan dan hasilnya lebih menekankan pada pemahaman makna dari fenomena yang diteliti.

1.3 Lokasi Penelitian

Sebelum melakukan penelitian peneliti harus menentukan lokasi atau tempat penelitian terlebih dahulu dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti perlu mempertimbangkan beberapa hal agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Moleong (2018:128) mengatakan bahwa “Cara yang tepat dalam menentukan lokasi penelitian adalah dengan mempertimbangkan teori yang digunakan serta memahami fokus dan rumusan masalah penelitian selain itu, peneliti juga perlu mempertimbangkan keterbatasan yang ada, seperti jarak lokasi, waktu, biaya, dan tenaga yang dimiliki”.

Menurut Usman dan Akbar (2017:77) mengemukakan “Lokasi penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian dilaksanakan”. “Menurut Sugiyono (2017:286) menjelaskan bahwa “Dalam suatu penelitian lokasi penelitian berkaitan dengan perencanaan kegiatan penelitian yang dilengkapi dengan jadwal penelitian. Jadwal tersebut berisi kegiatan yang akan dilakukan serta waktu pelaksanaannya”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian yang ditentukan dengan mempertimbangkan fokus penelitian, kondisi lapangan, serta keterbatasan waktu,

biaya, dan tenaga penentuan lokasi penelitian sangat penting agar kegiatan penelitian dapat berjalan dengan terencana dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun lokasi penelitian yang peneliti tetapkan adalah Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

1.4 Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional diperlukan untuk membantu memperjelas pemahaman tentang istilah-istilah penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan adanya definisi konsepsional, peneliti dan pembaca dapat memahami arah dan makna dari konsep yang digunakan dalam penelitian. Definisi konsepsional digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan konsep utama dalam penelitian ini Menurut Rianto (2016:27) mengatakan”Konsepsional adalah konsep atau variabel yang merupakan gambaran abstrak dari suatu gejala atau fenomena yang akan diteliti”. Menurut Mulyadi (2015:1) mengatakan bahwa “Konsep adalah gambaran umum yang menjelaskan ciri-ciri dari suatu objek, peristiwa, atau fenomena tertentu. Menurut Idrus (2015:17) menyatakan bahwa “Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala secara abstrak, seperti kejadian, keadaan, atau kelompok tertentu”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat peneliti simpulkan yaitu definisi konsepsional merupakan upaya untuk memahami secara lebih mendalam tentang implementasi program bantuan sosial berbasis masyarakat, yang berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat sehingga di dalam pelaksanaannya program ini

melibatkan peran masyarakat, aparat kelurahan, dan lembaga sosial setempat, sehingga program bantuan sosial di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang dapat berjalan tepat sasaran, terbuka, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi konsepsional adalah penjelasan mengenai konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Dengan adanya definisi konsepsional, penelitian dapat lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam menjelaskan fokus penelitian, khususnya mengenai implementasi program bantuan sosial berbasis masyarakat.

3.5 Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian, peneliti perlu menetapkan fokus penelitian agar pembahasan tidak keluar dari tujuan yang telah ditentukan. Fokus penelitian membantu peneliti dalam menentukan arah dan batasan masalah yang akan diteliti. Dengan adanya fokus penelitian, pembahasan menjadi lebih jelas, terarah, dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:290) “fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian hal ini dapat dilakukan karena adanya keterbatasan peneliti, seperti keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, sehingga peneliti perlu menentukan bagian tertentu yang akan diteliti agar hasil penelitian lebih terarah”.

Menurut Fathor (2022:56) mengatakan bahwa “Fokus penelitian kualitatif terletak pada pengalaman dan pandangan informan, serta bagaimana mereka memahami kehidupan dan keadaan yang mereka alami penelitian kualitatif

bertujuan untuk memahami berbagai kenyataan yang terjadi di lapangan”. Kemudian menurut James P. Spradley (dalam Sugiyono, 2017:286) menjelaskan bahwa “Fokus penelitian adalah hal utama atau beberapa bagian penting yang berkaitan dengan situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian adalah batasan masalah yang ditentukan oleh peneliti agar penelitian lebih terarah dan jelas fokus penelitian membantu peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam, terutama yang berkaitan dengan pengalaman informan dan situasi sosial yang menjadi objek penelitian.

. Berdasarkan penjelasan fokus penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah pada Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat di Kelurahan Loa Buah Kota Samarinda yang ditinjau melalui empat indikator menurut George C. Edwards III, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

1.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder kedua sumber data tersebut digunakan untuk membantu peneliti memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut Sugiyono (2020:367) mengatakan dalam “Penelitian data dapat diperoleh dari sumber primer dan sumber

sekunder sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung, sedangkan sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya. Menurut Lexy J. Moleong (2018:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan dan terdapat juga data tambahan seperti dokumen dan sumber lain yang dapat mendukung penelitian. Selanjutnya menurut Suharsimi Arikunto (2019:172) mengatakan “Sumber data adalah subjek atau pihak dari mana data dapat diperoleh, terutama jika peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara atau kuesioner.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat peneliti disimpulkan bahwa sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi asal diperolehnya data penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian kualitatif, sumber data utama biasanya berupa kata-kata dan tindakan informan, sedangkan data tambahan dapat berupa dokumen atau sumber pendukung lainnya.

3.6.1 Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan wawancara dan observasi di lapangan data ini diperoleh dari informan yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2016:187) mengatakan “Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada peneliti sebagai pengumpul data. Menurut Sumadi Suryabrata (2014:39), mengatakan bahwa “Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama atau sumber pertama”.

Dalam menentukan informan utama, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2019:289) “*Purposive Sampling* adalah teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu memilih orang yang dianggap paling mengetahui dan memahami masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik *Accidental Sampling* untuk menentukan informan tambahan. Menurut Sugiyono (2019:297), *Accidental Sampling* adalah teknik pemilihan informan secara kebetulan, yaitu siapa saja yang ditemui secara langsung oleh peneliti dan dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tambahan dari masyarakat yang ditemui di lokasi penelitian.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Dalam menentukan informan, peneliti dapat menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk memilih informan utama yang dianggap mengetahui masalah penelitian, serta *Accidental Sampling* untuk mendapatkan informan tambahan yang dapat memberikan informasi pendukung. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi tambahan dari masyarakat yang ditemui secara langsung di lokasi penelitian dan dianggap mampu memberikan data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:

1. *Key informant* adalah seseorang yang dianggap paling menegetahui dan memahami secara mendalam mengenai objek atau permasalahan yang diteliti. *Key informant* dalam penelitian ini yaitu Bapak Budi Hartono, S.Sos selaku Lurah Loa Buah.
2. Informan: orang-orang yang memberikan tanggapan tentang permasalahan yang di rasakan terkait penelitian yang dilakukan peneliti, Informan dalam penelitian ini ialah:

Tabel 3.2 Daftar Key informant dan Informan

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Budi Hartono, S.Sos	Lurah	<i>Key informant</i>
2.	Eka Handayani, A.Ma.,S.Pd	Kasi Kesra	Informan
3.	Bintang Ayu Candra	Ketua RT	Informan
4.	Nurlailah	Masyarakat	Informan
5.	Hamlinah	Masyarakat	Informan
6.	Agustina	Masyarakat	Informan
7.	Nurdiana	Masyarakat	Informan

Sumber: Di Buat Oleh Peneliti, 2025

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber tertulis seperti laporan, buku, dan catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini digunakan sebagai bahan pendukung untuk melengkapi data yang diperoleh di lapangan. Menurut Sumadi Suryabrata (2016:39), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen, seperti data kependudukan suatu daerah, data hasil kegiatan suatu lembaga, serta data lain yang telah disusun sebelumnya.

Menurut Sugiyono (2015:187), sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer, yang dapat diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, buku, jurnal, majalah, koran, dan arsip tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama tetapi melalui dokumen, buku, jurnal, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer agar hasil penelitian menjadi lebih lengkap dan dapat dipercaya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Dokumen
2. Buku dan Jurnal

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti perlu menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Penggunaan teknik yang tepat sangat penting agar data yang diperoleh dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Menurut Zuchri Abdussamad (2021:142) mengatakan “Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Lexy J. Moleong (2014:58) mengemukakan “Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian”.

Menurut Sugiyono (2015:375) mengatakan “Teknik pengumpulan data merupakan bagian utama dalam penelitian karena penelitian bertujuan untuk memperoleh data jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data dengan baik, maka data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan standar penelitian”.

Secara umum, teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data memiliki peran penting karena menentukan kualitas data yang diperoleh. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan program bantuan sosial berbasis masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang. Menurut Sugiyono (2018:145), mengatakan bahwa “Observasi adalah suatu proses yang kompleks karena melibatkan berbagai proses baik biologis maupun psikologis dua proses yang paling penting dalam observasi adalah proses pengamatan dan proses mengingat. Purnomo Setiady Akbar (2017:52), mengatakan “Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang sedang diteliti”.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab secara langsung kepada *Key Informant* dan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2018:186) mengatakan “Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu”.

Selanjutnya, menurut Husaini (2017:55), mengatakan bahwa “Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung”. Menurut Supriyanti (2015:48), mengatakan bahwa “Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang efektif untuk memahami kebutuhan atau keinginan seseorang, yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden”.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:396) “Dokumen adalah catatan dari peristiwa yang telah terjadi dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya lainnya, dokumen tertulis misalnya catatan harian, riwayat hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sedangkan dokumen berbentuk gambar dapat berupa foto, patung, film, dan sebagainya. Studi dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam metode observasi dan wawancara, khususnya dalam penelitian kualitatif”. Menurut Suharsimi Arikunto (2019:3), “Dokumentasi adalah kumpulan data dalam bentuk tulisan yang digunakan sebagai pendukung data hasil observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi penelitian”.

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa arsip kelurahan, daftar penerima bantuan, laporan kegiatan, serta foto-foto penyaluran bantuan dokumentasi tersebut juga berfungsi untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara terkait pelaksanaan program bantuan sosial berbasis masyarakat di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang.

3.8 Analisis Data

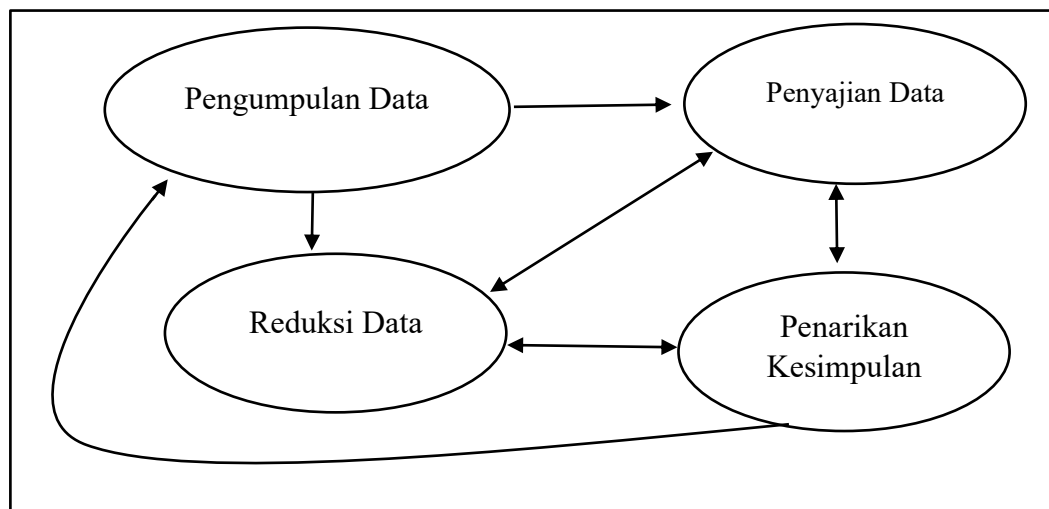
Analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, baik dari responden maupun sumber data lainnya, sehingga data tersebut dapat dipahami dengan baik. Menurut Sugiyono (2015:244) mengatakan “Analisis data adalah kegiatan mencari dan menyusun data secara sistematis yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan berbagai bahan lainnya agar mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori menguraikannya menjadi bagian-bagian, melakukan penggabungan, menyusun pola, menentukan data yang penting untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain”.

Menurut Lexy J. Moleong (2016:280) “Analisis data adalah proses mengatur dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian tertentu, sehingga dapat ditemukan tema serta dirumuskan kesimpulan sementara sesuai dengan data yang diperoleh kemudian menurut James Spradley (dalam Sugiyono, 2017:224), analisis data merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan secara

sistematis untuk mengkaji suatu hal, dengan tujuan mengetahui bagian-bagian yang ada, hubungan antar bagian, serta hubungan dengan keseluruhan”.

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan model analisis interaktif. Model ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keempat tahapan tersebut saling berkaitan dan dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian.

Gambar 3. 1 Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:337)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dengan berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode lainnya. Menurut Sugiyono (2020:375) “Secara umum teknik pengumpulan data terdiri dari empat jenis, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan dari beberapa teknik”.

Kemudian Sugiyono (2018:224) menjelaskan bahwa “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai situasi, sumber, dan cara jika dilihat dari sumbernya data dapat berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang memberikan data secara langsung kepada peneliti sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang memberikan data melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen pengumpulan data dalam penelitian biasanya dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan, serta mengubah data mentah ke dalam bentuk catatan yang lebih teratur dan mudah dipahami.

Menurut Sugiyono (2018:247) mengatakan “Data yang diperoleh dari lapangan biasanya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci semakin lama peneliti melakukan penelitian, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit dan diperlukan proses reduksi data untuk mempermudah analisis”.

Menurut Sugiyono (2020:405) juga menjelaskan bahwa “Reduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal yang utama, serta mencari tema dan pola sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melanjutkan proses pengumpulan data maupun analisis”.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data penyajian data bertujuan agar data dapat tersusun dengan rapi dan mudah dipahami.

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (dalam Sugiyono, 2020:408), penyajian data tidak hanya dalam bentuk teks naratif, tetapi juga dapat berupa grafik, matriks, jaringan kerja, dan bagan. Menurut Sugiyono (2018:249) menyatakan bahwa dalam “Penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, maupun gambar lainnya penyajian data tersebut membantu peneliti dalam mengorganisasikan data sehingga hubungan antar data menjadi jelas dan mudah dipahami”.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah proses akhir dalam analisis data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini harus sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020:412) mengatakan “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan temuan tersebut dapat berupa gambaran, hubungan, atau penjelasan mengenai suatu fenomena yang diteliti”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Samarinda merupakan Ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah sekitar 718,00 km² secara administratif seluruh wilayah Kota Samarinda berbatasan dengan wilayah kabupaten Kutai Kartanegara baik bagian Utara, Timur, Selatan, dan Barat, Batas wilayah Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbatasan Wilayah

No	Arah Mata Angin	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara
2.	Sebelah Selatan	Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara
3.	Sebelah Barat	Kecamatan Tenggarong dan Muara Badak, Kutai Kartanegara
4.	Sebelah Timur	Kecamatan Muara Badak, Anggana dan Sanga- Sanga, Kutai Kartanegara

Sumber Data : Profil Kelurahan Loa Buah, 2025

Secara administratif Kota Samarinda terbagi dalam 10 wilayah kecamatan yaitu kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Sebrang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang yang secara keseluruhan terdiri dari 53 Desa atau Kelurahan. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Samarinda dipimpin oleh Walikota sebagai kepala Pemerintahan wilayah Kota Samarinda kemudian dibentuk susunan tatanan kerja organisasi dan tata kerja pemerintahan yang dibantu oleh Kecamatan sebagai

pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan di bantu oleh Kelurahan yang berada di bawah Kecamatan.

Kelurahan Loa Buah merupakan salah satu unit administratif wilayah Kota Samarinda yang berada di bawah Kecamatan Sungai Kunjang, dengan fungsi utama sebagai unsur pelaksana teknis pemerintahan yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Wali Kota sesuai kebutuhan kecamatan. Wilayah ini awalnya merupakan pemukiman yang berkembang di sepanjang aliran Sungai Mahakam hingga kemudian mengalami perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi yang mendorong pemerintah melakukan penataan administratif. Pada tahun 1996 wilayah ini ditetapkan sebagai Kelurahan Loa Buah, dan selanjutnya dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2001 bersama Kelurahan lain di Kota Samarinda. Kelurahan Loa Buah memiliki luas wilayah 1.231,86km² dengan alamat kantor kelurahan berada di Jalan Plamboyan RT 17, serta memiliki letak yang strategis karena berbatasan dengan Kelurahan Loa Bakung di sebelah Utara, Sungai Mahakam di sebelah Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah Barat, dan Sungai Mahakam di sebelah Timur. Posisi ini menjadikan Kelurahan Loah Buah sebagai wilayah yang penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas sosial, serta pelayanan pemerintahan di kawasan Sungai Kunjang.

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian yang peneliti dapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti juga akan memberi gambaran umum mengenai data Kelurahan Loah Buah Kecamatan Sungai

Kunjang Kota Samarinda. Untuk lebih memperjelas tempat peneliti melaksanakan penelitian maka, peneliti memberikan gambaran secara umum.

4.2 Tugas pokok dan Fungsi Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan. Kelurahan mempunyai tugas yang terdapat dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Organisasi Kelurahan sebagai unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam wilayah kecamatan daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkata akuntabilitas.

Organisasi Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai fungsi yang terdapat dalam Pasal 3 yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan dan melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum terhadap masyarakat, dan menyelenggarakan ketentraman umum, pemeliharaan prasarana, dan fasilitas pelayanan umum serta pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada Walikota melalui camat;
- d. Pelaksanaan lingkungan hijau, bersih, dan sehat; dan

- e. Pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan pembangunan.

4.3 Visi dan Misi Kota Samarinda

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Dapat dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga.

Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Di samping itu misi juga dapat di artikan sebagai suatu tujuan mengapa sebuah instansi atau organisasi atau lembaga.

Visi dan Misi Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang masih menggunakan Visi dan Misi yang dimiliki Kota Samarinda yaitu:

1. Visi Kota Samarinda

“Samarinda Maju, Kaltim Maju, Mandiri, Adil, ber-Jaya, Unggul”

2. Misi Kota Samarinda

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing.
- b. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan.
- c. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
- d. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekonomis.

- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabilitas.

4.4 Keadaan Sumber Daya Manusia

Keadaan sumber daya manusia di suatu kelurahan sangat berpengaruh pada kelancaran pelayanan kepada masyarakat, di Kelurahan Loa Buah, terdapat 8 orang pegawai yang masing-masing sudah memiliki tugas dan jabatan tertentu, pegawai inilah yang setiap hari mengurus berbagai pelayanan administratif untuk warga, seperti pembuatan surat keterangan, kartu keluarga, surat pindah, dan layanan lainnya, dengan jumlah pegawai yang ada kelurahan berusaha memberikan pelayanan yang baik, meskipun setiap pegawai memiliki peran yang berbeda-beda mulai dari lurah, sekretaris, hingga para staf yang membantu pekerjaan administrasi. Keberadaan pegawai yang cukup serta pembagaaian tugas yang jelas membuat proses pelayanan di Kelurahan Loa Buah dapat berjalan dengan lebih teratur, berikut ini merupakan data terkait pegawai yang berada di Kelurahan Loa Buah.

Tabel 4.2 Data Jumlah Pegawai Kelurahan Loa Buah Berdasarkan Jabatan

No	Nama	Jabatan
1.	Budi Hartono, S.sos	Lurah
2.	Acep Deni, SE	Sekretaris Lurah
3.	Akhmad Tarmiji	Bendahara
4.	Eka Handayani, S.Amd.,S.Pd	Kasih Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat
5.	H. Noviansyah, S.E	Kasi Ekonomin
6.	Yuliana Agung Nasiti	Staf Sekertaris
7.	Nortje Elfi Sambeth	Staff Kasi Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
8.	Nor Aisyah	Staff Kasi Ekonomi, Pembangunan Dan Lingkungan Hidup

Sumber Data: Profil Kelurahan Loa Buah,2025

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pegawai Kelurahan merupakan orang yang terlibat dalam urusan Pemerintahan yang ada di Kelurahan yang sudah ada terbagi dalam tugas dan jabatannya mulai dari lurah, sekeretaris, bendahara, kasi pemerintahan, ketentaraman dan ketertiban, kasi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kasi ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, staf sekretaris, staf kasi ekonomi dan pembangunan, PTTH (Pegawai Tidak Tetap

Harian). Kelurahan merupakan pemerintahan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan tabel 4.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Loa Buah.

Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Tetangga

No.	Nama RT	Jumlah (jiwa)
1	RT. 01	143
2	RT. 02	429
3	RT. 03	355
4	RT. 04	717
5	RT. 05	169
6	RT. 06	496
7	RT. 07	520
8	RT. 08	517
9	RT. 09	649
10	RT. 10	894
11	RT. 11	376
12	RT. 12	394
13	RT. 13	343
14	RT. 14	291
15	RT. 15	101

Bersambung...

Sambungan Tabel 4.3

16	RT. 16	189
17	RT. 17	226
18	RT. 18	86
19	RT. 19	338
20	RT. 20	301
JUMLAH		7.534

Sumber Data : Profil Kelurahan Loa Buah, 2025

Selanjutnya peneliti akan memaparkan tabel 4.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki- Laki	3.867
2	Perempuan	3.667
Total Penduduk		7.534

Sumber Data : Profil Kelurahan Loa Buah,2025

Terdapat dua (2) Tabel di atas yang menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan Rukun Tetangga (RT) dan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, berdasarkan tabel jumlah penduduk per RT dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Loa Buah memiliki dua puluh (20) RT dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda pada setiap RT. RT dengan jumlah penduduk terbanyak adalah RT 10 dengan 894 jiwa,

sedangkan RT dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah RT 18 dengan 86 jiwa, secara keseluruhan jumlah penduduk pada 20 RT tersebut adalah 7.534 jiwa.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	USIA	Jumlah Jiwa
1	0-11 Bulan	62
2	1-5 Tahun	163
3	6-16 Tahun	1.317
4	17-59 Tahun	5.553
5	>60 Tahun	439
Jumlah		7.534

Sumber Data : Profil Kelurahan Loa Buah, 2025

Tabel tersebut menunjukkan jumlah penduduk Kelurahan Loa Buah berdasarkan kelompok usia. Kelompok usia bayi (0- 11 bulan) berjumlah 62 jiwa, usia 1-5 tahun berjumlah 163 jiwa, dan usia 6-16 tahun berjumlah 1.317 jiwa. Penduduk terbanyak berada pada usia produktif yaitu berjumlah 17-59 tahun dengan jumlah 5.553 jiwa, sedangkan penduduk usia lanjut (>60 tahun) berjumlah 439 jiwa. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Loa Buah adalah kelompok usia produktif yang paling banyak melakukan aktivitas dan berpotensi menjadi pengguna layanan administrasi di kantor Kelurahan. Kondisi ini sesuai dengan temuan bahwa setiap hari terdapat sekitar 5-10 warga yang datang untuk mengurus layanan seperti surat pindah, surat keterangan, kartu keluarga, dan lainnya.

Tabel 4. 6 Data Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Kantor Kelurahan	1	Dalam Pembangunan
2.	Posyandu Lansia	1	Layak
3.	Posyandu Bayi dan Balita	7	Layak
4.	Gedung TK	3	Layak
5.	Gedung SD	5	Layak
6.	Gedung SLTP	2	Layak
7.	Gedung SLTA	1	Layak
8.	Pondok Pesantren	1	Layak
9.	Madrasah	1	Layak
10.	Masjid	7	Layak
11.	Musholla	9	Layak
12.	Gereja	3	Layak
13.	Lapangan Sepak Bola	1	Layak

Sumber Data: Profil Kelurahan Loa Buah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Loa Buah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk mendukung kegiatan masyarakat. Terdapat 1 kantor Kelurahan yang masih dalam tahap pembangunan, 1 posyandu lansia, dan 7 posyandu bayi dan balita yang semuanya dalam kondisi layak. Untuk sarana pendidikan tersedia 3 gedung TK, 5 gedung SD, 2 gedung SLTP, dan 1 gedung SLTA yang juga layak digunakan. Sarana keagamaan terdiri dari 7 masjid, 9 musholla, 3 gereja, serta 1 pondok pesantren dan 1 madrasah, semuanya dalam

kondisi layak. Selain itu Kelurahan Loa Buah memiliki 1 lapangan sepak bola yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga masyarakat. Menunjukkan bahwa sarana di Kelurahan cukup mendukung.

Tabel 4.7 Pekerjaan / Mata Pencarian

No	Pekerjaan	Jiwa
1.	Nelayan/ Perikanan	0
2.	Karyawan Swasta	2.238
3.	Karyawan BUMN	2
4.	Karyawan Honorer	9
5.	Buruh Harian Lepas	54
6.	Mengurus Rumah Tangga	4.187
7.	Buruh Tani/ Berkebun	2
8.	Buruh Peternakan	1
9.	Pembantu Rumah Tangga	2
10.	Tukang Batu	2
11.	Tukang Kayu	1
12.	Tukang Las/ Pandai Besi	2
13.	Pelajar/ Mahasiswa	1.102
14.	Tukang Jahit	4
15.	Mekanik	6

Bersambung...

Sambungan Tabel 4.7

16.	Pensiunan	9
17.	Imam Masjid	5
18.	Wartawan	1
19.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	52
20.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1
21.	Dosen	3
22.	Guru	1
23.	Kepolisian RI (POLRI)	3
24.	Bidan	4
25.	Perawat	10
26.	Pelaut	5
27.	Perdagangan	5
28.	Sopir	9
29.	Pedagang	25
30.	Wiraswata	239
31.	Petani/ Perkebunan	46
32.	Pekerjaan Lainnya	2
Jumlah		5.685

Sumber Data : Profil Kelurahan Loa Buah, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Loa Buah memiliki beragam jenis pekerjaan dengan jumlah terbesar berasal dari kelompok yang mengurus rumah tangga sebanyak 4.187 Jiwa, disusul dengan pelajar dan mahasiswa sebanyak 1.102 Jiwa dan wiraswata sebanyak 239 Jiwa, sementara pekerjaan lainnya seperti buruh harian lepas, petani, sopir, pedagang, perawat, bidan, mekanik, hingga profesi formal yaitu PNS, TNI, POLRI, guru dan dosen jumlahnya lebih sedikit, secara keseluruhan data ini menggambarkan bahwa sebagian besar warga berada dalam kategori tidak bekerja karena fokus pada urusan rumah tangga serta sebagian masih menempuh pendidikan, sedangkan sebagian diantaranya bekerja di sektor formal maupun informal untuk memenuhi kebutuhan hidup.

4.5 Struktur Organisasi

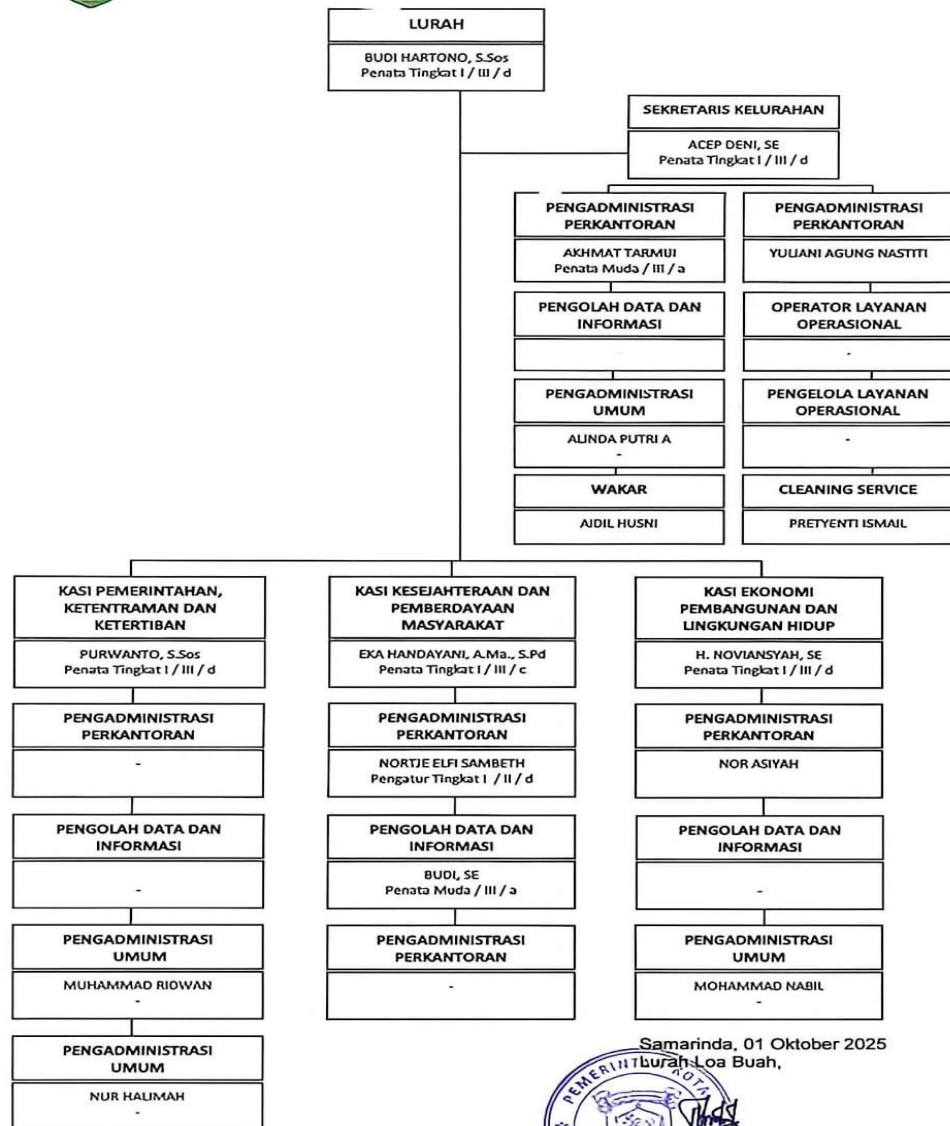
Struktur organisasi adalah kerangka atau tata letak yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi diatur dan bagaimana interaksi antar bagian dalam organisasi tersebut. Struktur ini mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang serta hubungan antara anggota organisasi. Adapun gambaran struktur organisasi Kelurahan Loa Buah, sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai



STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN LOA BUAH



Samarinda, 01 Oktober 2025
Bupati Loa Buah,



Budi Hartono, S.Sos
Penata Tingkat I / III / d
NIP. 19751216 200012 1 002

Sumber Data Profil : Profil Kelurahan Loa Buah 2025

4.6 Penyajian Data Hasil Penelitian

Penyajian data hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah. Penelitian ini menggunakan empat indikator berdasarkan teori George C. Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Data dari hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan *Key Informant* dan informan. Berikut peneliti uraikan hasil penelitian di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda:

4.6.1 Komunikasi

Berikut merupakan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari *Key Informant* dan informan mengenai indikator Komunikasi dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Bagaimana cara Kelurahan menyampaikan informasi tentang program bansos kepada RT dan warga ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Budi Hartono,S.Sos selaku Lurah Loa Buah (*Key Informant*) diperoleh informasi yang mengatakan bahwa:

“Informasi mengenai bantuan sosial pertama kali itu diketahui oleh ketua RT melalui grup *WhatsApp* RT kemudian pihak kelurahan menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh ketua RT, lalu ketua RT meneruskannya kepada masyarakat dan sosialisasi juga telah dilakukan sebelum bantuan sosial disalurkan dan saat ada rapat RT pihak kelurahan turut menyampaikan bahwa akan ada penyaluran bantuan sosial di Kelurahan”.(Wawancara tanggal 16 Desember 2025)

Kemudian hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Eka Handayani,A.Ma.,S.Pd selaku Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

mengatakan bahwa: “sejauh ini komunikasi antara pihak kelurahan dengan RT maupun masyarakat telah berjalan dengan baik, dan informasi yang disampaikan juga dapat dipahami dengan mudah”. (Wawancara tanggal 16 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Bintang Ayu Candra selaku ketua RT 12 diperoleh informasi yakni:

“Informasi mengenai bantuan sosial itu pertama kali diterima dari pihak kelurahan melalui grup *WhatsApp* ketua RT, yang berisi pemberitahuan bahwa akan ada penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.” (Wawancara tanggal 16 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nurlailah selaku masyarakat penerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni: “Saya mengetahui adanya bansos ini dari grup *WhatsApp* RT. Dan untuk penjelasannya mengenai bantuan sosial ini sangat jelas dan mudah di pahami.” (Wawancara tanggal 17 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Hamlinah selaku masyarakat penerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni: “Saya mengetahui adanya bantuan sosial dari grup *WhatsApp* RT yang menginfokan dan menurut saya jelas dan mudah dipahami”. (Wawancara tanggal 17 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Agustina selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni:

“Saya memperoleh informasi mengenai program bantuan sosial melalui saudara saya yang bekerja di dinas sosial setiap terdapat informasi terkait

bantuan sosial, biasanya informasi tersebut disampaikan kepada saya. Namun hingga saat ini saya belum pernah menerima bantuan tersebut dan menurut saya, informasi yang diberikan masih kurang jelas dan belum sepenuhnya terbuka”. (Wawancara tanggal 18 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nurdiana selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni:”
“Saya mengetahui adanya program bantuan sosial dari teman-teman di lingkungan sekitar yang memberikan informasi kepada saya dan menurut saya informasi yang disampaikan masih kurang jelas”.(Wawancara tanggal 18 Desember 2025)

4.6.1 Sumber Daya

Berikut merupakan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari *Key Informant* dan informan mengenai indikator Sumber Daya dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Apakah anggaran, tenaga, dan fasilitas yang tersedia cukup untuk menjalankan program?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Budi Hartono, S.Sos selaku Lurah Kelurahan Loa Buah (*Key Informan*) mengatakan bahwa:

“Saat ini di Kelurahan Loa Buah fasilitas yang tersedia sudah cukup memadai khususnya ruangan yang digunakan untuk menampung bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat namun, masih ada kekurangan pada bagian tenaga Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesra), karena jumlah penerima bantuan sosial cukup banyak sehingga memerlukan tambahan tenaga untuk mendampingi masyarakat penerima bantuan dalam pelaksanaannya dan tugas tersebut biasanya dibantu oleh staf lain sehingga hal ini menjadi salah satu kendal. Selain itu untuk anggaran pihak kelurahan tidak menyiapkan anggaran khusus karena anggaran bantuan sosial berasal dari pihak penyalur”.(Wawancara tanggal 16 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Eka Handayani, A.Md.,S.Pd selaku Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat diperoleh informasi yakni:

“Untuk proses pendataan yang melakukan itu dari pihak penyalur, kami dari pihak kelurahan turut membantu apabila pihak penyalur menghadapi kendala, seperti membantu dalam dokumentasi serta menyediakan fasilitas berupa komputer, printer, dan perlengkapan lainnya selain itu pihak kelurahan juga ikut berpartisipasi dalam proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat supaya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar”. (Wawancara tanggal 16 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Bintang Ayu Candra selaku ketua RT 12 diperoleh informasi yakni:

“Dalam pelaksanaan bantuan sosial masih terkendala pada proses pendataan penerima karena data ditentukan oleh pemerintah pusat hingga ke kelurahan dan ketua RT juga tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi atau mengubah data penerima meskipun ditemukan ketidaksesuaian di lapangan karena peran RT hanya sebatas mendampingi dalam proses penyaluran bantuan sosial.”(Wawancara tanggal 16 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nurlailah selaku masyarakat penerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni:

“Proses pendataan bantuan sosial dinilai mudah dipahami karena sebelum pelaksanaan pendataan diberikan penjelasan mengenai tahapan yang akan dilakukan. Dan bantuan sosial tersebut sangat dibutuhkan karena saya saat ini belum memiliki penghasilan yang jelas”.(Wawancara tanggal 17 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Hamlinah selaku masyarakat penerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni:

“Proses pendataan bantuan sosial tergolong mudah karena tidak banyak yang dibutuhkan dan saya menilai bahwa bantuan sosial diberikan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhannya, terutama bantuan beras dan yang lainnya yang merupakan kebutuhan paling penting dibutuhkan”. (Wawancara tanggal 17 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Agustina selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial menyampaikan bahwa: “Pernah di data sebagai calon penerima bantuan sosial, namun belum pernah ada menerima bantuan tersebut dengan hal ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial belum merata dan belum adil”.(Wawancara tanggal 18 Desember 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nurdiana selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni:

“Bahwa sampai saat ini tidak pernah dimintai data maupun keterangan terkait kondisi ekonominya kondisi tersebut dinilai belum mencerminkan keadilan secara menyeluruh, mengingat saya berstatus sebagai janda yang telah lanjut usia serta penghasilan juga bisa dikatakan relatif terbatas seharusnya saya termasuk sebagai penerima bantuan sosial namun setiap kali dilakukan penyaluran bantuan sosial saya tidak pernah menerimanya”. (Wawancara tanggal 18 Desember 2025).

4.6.3 Disposisi / Sikap Pelaksana

Berikut merupakan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari *Key Informant* dan informan mengenai indikator Disposisi/sikap pelaksana dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Bagaimana sikap dan komitmen perangkat Kelurahan dan RT dalam menjalankan program ?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Budi Hartono, S.Sos selaku Lurah Loa Buah diperoleh informasi yakni:

“Sejauh ini komitmen dalam pelaksanaan bantuan sosial telah dilaksanakan secara transparan dan jelas pihak RT juga telah menyampaikan informasi dengan baik kepada para penerima bantuan sosial dan sikap masyarakat saat datang ke kelurahan untuk mengambil bantuan sosial juga menunjukkan etika yang baik dan sopan.”. (Wawancara tanggal 16 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Eka Handayani, A., Md., S.Pd selaku Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat diperoleh informasi yakni:

“Pihak kelurahan sangat terlibat dalam pelaksanaan bantuan sosial hal ini terlihat dari keseriusan perangkat kelurahan dalam mengawasi dan mendampingi proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Selain itu, pihak kelurahan juga turut membantu agar bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan tujuannya adalah agar bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sesuai dengan kondisi penerima di lapangan”. (Wawancara tanggal 16 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Bintang Ayu Candra selaku ketua RT 12 diperoleh informasi yakni:

“Dalam pelaksanaan bantuan sosial tersebut sering mendapatkan protes dari masyarakat sering terjadi dan bahkan menimbulkan konflik antara pihak RT dan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial tersebut hal ini disebabkan karena terdapat beberapa masyarakat yang tergolong mampu menerima bantuan sosial lebih dari satu kali sedangkan masyarakat tidak mampu yang tidak menerima bantuan sosial”. (Wawancara tanggal 16 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nurlailah selaku masyarakat yang menerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni: “Sikap petugas kelurahan dan RT sudah sangat ramah serta pelayanan yang diberikan pada saat penyaluran bantuan sosial juga baik. selain itu penyaluran bantuan tersebut

diberikan kepada masyarakat yang layak dan membutuhkan bantuan”. (Wawancara tanggal 17 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Hamlinah selaku masyarakat penerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni:

“Menurut saya sikap pihak kelurahan dan RT sudah baik karena mereka memberikan penjelasan apabila ada hal yang belum dipahami serta pelayanan pada saat penyaluran bantuan sosial juga dinilai baik serta bantuan sosial juga dapat diwakilkan ketika penerima tersebut tidak dapat hadir”. (Wawancara tanggal 17 Desember 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Agustina selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni:

“Menurut saya, sikap petugas dinilai kurang baik dalam memberikan penjelasan ketika saya menanyakan alasan tidak menerima bantuan sosial mereka menyampaikan bahwa akan dilakukan pendataan kembali namun pada saat pendataan telah dilakukan beberapa kali, saya tetap belum menerima bantuan tersebut sehingga petugas juga dinilai kurang terbuka karena bantuan sosial lebih sering diberikan kepada masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pihak RT”. (Wawancara tanggal 18 Desember)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nurdiana selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni:

“Menurut saya sikap petugas masih kurang terbuka dan belum adil karena masyarakat yang kurang mampu seharusnya didata seluruhnya agar dapat menerima bantuan sosial”. (Wawancara tanggal 18 Desember 2025).

4.6.4 Struktur Birokrasi

Berikut merupakan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari *Key Informant* dan informan mengenai indikator Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Bagaimana alur atau prosedur penyaluran bantuan sosial di Kelurahan ?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Budi Hartono, S.Sos selaku Lurah Loa Buah diperoleh informasi yakni:

“Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan dengan menyesuaikan ketentuan dari pihak penyalur selama ini untuk alur penyalurannya berjalan dengan baik, di mana prosedur diberikan dalam bentuk formulir yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang akan mendapatkan bantuan melalui masing-masing RT, selanjutnya masyarakat membawa formulir tersebut saat pengambilan bantuan sosial dan standar operasional prosedur (SOP) dari pihak penyalur telah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik serta mudah untuk dijalankan”. (Wawancara tanggal 16 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Eka Handayani, A., Md, S.Pd selaku Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat diperoleh informasi yakni:

“Alur pendataan bantuan sosial berasal dari pihak penyalur yang kemudian menyerahkan daftar nama-nama penerima kepada pihak kelurahan kemudian pihak kelurahan akan menyampaikan informasi tersebut kepada masing-masing ketua RT dengan demikian proses penyaluran bantuan sosial dinilai tidak mengalami kendala yang berarti”. (Wawancara tanggal 16 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Bintang Ayu Candra selaku ketua RT diperoleh informasi yakni:

“Terkait proses pendataan hal tersebut tidak diketahui secara rinci karena bukan menjadi tugas saya sebagai ketua RT dalam melakukan pendataan, melainkan hanya menerima data dari pihak kelurahan adapun prosedur yang ada dinilai mudah untuk diikuti serta tugas yang dilaksanakan adalah mendampingi masyarakat yang menerima bantuan sosial sesuai dengan arahan dari pihak kelurahan”. (Wawancara tanggal 16 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nurlailah selaku masyarakat penerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni:

“Menurut saya mulai dari pendataan hingga penerimaan bantuan sosial mudah dipahami dan diikuti hal ini menunjukkan karena petugas memberikan arahan secara langsung mengenai tahapan yang harus dilakukan seperti melakukan tanda tangan terlebih dahulu, kemudian dilakukan dokumentasi sebagai bukti bahwa bantuan sosial telah diterima”. (Wawancara tanggal 17 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hamlinah selaku masyarakat penerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni: “Untuk proses mulai dari pendataan hingga penerimaan bantuan sosial berjalan dengan baik dan mudah untuk dilakukan dan petugas juga memberikan arahan sehingga setiap tahapan dapat dilaksanakan dengan mudah diikuti”. (Wawancara tanggal 17 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Agustina selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni:

“Prosedur atau alur penetapan penerima bantuan sosial dinilai belum sepenuhnya jelas, sehingga sebagian masyarakat masih ada kesulitan dalam memahami proses penetapan penerima bantuan dengan begitu hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan penerima bantuan sosial belum tersusun secara sistematis dan belum mudah dipahami oleh seluruh masyarakat”. (Wawancara tanggal 18 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nurdiana selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial diperoleh informasi yakni:

“Prosedur bantuan sosial dinilai belum sepenuhnya jelas, sehingga sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami alur pelaksanaan program dan masyarakat juga masih merasa bingung terhadap mekanisme bantuan sosial yang ada, termasuk bagaimana prosesnya berjalan dan kriteria yang digunakan dalam menentukan penerima bantuan”. (Wawancara tanggal 18 Desember 2025).

4. 7 Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini data yang diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan data hasil penelitian diperoleh dari wawancara dengan *Key Informant* dan informan mengenai Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Pembahasan ini dilakukan dengan menggunakan teori George C. Edward III (dalam Dedy Mulyadi) yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian yang dilakukan dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

4.7.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III. komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat sebagai sasaran program agar kebijakan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Komunikasi yang efektif tidak hanya berkaitan dengan penyampaian

informasi, tetapi juga kejelasan pesan serta pemahaman masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Loa Buah, komunikasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial telah dilakukan melalui koordinasi antara pihak kelurahan, ketua RT, dan masyarakat. Informasi mengenai penyaluran bantuan sosial disampaikan melalui grup *WhatsApp* ketua RT serta melalui pertemuan RT sebelum pelaksanaan penyaluran bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak kelurahan berperan sebagai penghubung informasi antara pihak penyalur bantuan dengan masyarakat.

Meskipun komunikasi telah dilakukan, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme penentuan penerima bantuan sosial. Hal ini disebabkan karena kelurahan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan atau mendata penerima bantuan, sehingga masyarakat terkadang masih merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai alasan mereka menerima atau tidak menerima bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami secara merata oleh seluruh masyarakat.

4.7.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber Daya menurut George C. Edward III mencakup sumber Daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas yang

digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Loa Buah, sumber daya yang dimiliki oleh pihak kelurahan dalam pelaksanaan program bantuan sosial masih terbatas. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah aparatur kelurahan yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan sosial masih terbatas sehingga dalam beberapa kondisi belum mampu memberikan pendampingan secara maksimal kepada masyarakat.

Selain itu, dari sisi kewenangan, pihak kelurahan tidak memiliki wewenang dalam menentukan ataupun mendata penerima bantuan sosial karena pendataan dilakukan oleh pihak penyalur berdasarkan data dari pemerintah pusat. Kelurahan hanya menerima daftar nama penerima bantuan dan membantu dalam proses koordinasi serta pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Walaupun demikian, dari sisi fasilitas kelurahan telah menyediakan sarana pendukung seperti tempat pelaksanaan penyaluran bantuan serta membantu proses distribusi bantuan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam sumber daya dan kewenangan, pihak kelurahan tetap berusaha mendukung pelaksanaan program bantuan sosial agar dapat berjalan dengan baik.

4.7.3 Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan sikap dan komitmen aparat dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut George C. Edward III, disposisi berkaitan dengan komitmen, kejujuran, dan kesediaan

aparatur dalam melaksanakan kebijakan. Sikap pelaksana memiliki peran penting dalam proses implementasi kebijakan di lapangan.

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat di Kelurahan Loa Buah, sikap aparat kelurahan dan ketua RT dinilai cukup baik oleh sebagian masyarakat. Pihak kelurahan dan RT dianggap ramah, terbuka, serta memberikan pelayanan yang baik saat penyaluran bantuan. Mereka juga memberikan penjelasan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait bantuan sosial.

Namun, terdapat pandangan berbeda dari sebagian masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial. Beberapa warga menilai bahwa sikap pihak kelurahan kurang terbuka dan kurang adil, terutama ketika masyarakat mempertanyakan alasan tidak menerima bantuan. Kondisi ini berkaitan dengan keterbatasan kewenangan kelurahan dalam menentukan penerima bantuan, sehingga tidak semua keluhan dapat ditindaklanjuti secara langsung.

4.7.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut George C. Edward III berkaitan dengan pembagian tugas, alur prosedur, dan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang melibatkan banyak tingkatan dapat mempengaruhi kecepatan pelayanan, terutama dalam penyampaian informasi dan penanganan masalah di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Loa Buah, pelaksanaan program bantuan sosial melibatkan beberapa pihak, yaitu

pemerintah pusat, pihak penyalur bantuan, kelurahan, dan ketua RT. Pemerintah pusat dan dinas terkait berperan dalam menetapkan kebijakan serta menentukan data penerima bantuan. Sementara itu, pihak penyalur bertugas menyalurkan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah ditetapkan.

Pihak kelurahan dan ketua RT berperan sebagai perantara yang membantu proses pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di tingkat kelurahan. Prosedur penyaluran bantuan dilakukan dengan mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyalur sehingga proses penyaluran bantuan dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Namun dalam pelaksanaannya, struktur birokrasi yang melibatkan beberapa tingkatan pemerintahan juga mempengaruhi fleksibilitas kelurahan dalam menyesuaikan data penerima bantuan dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan ini menyebabkan kelurahan tidak dapat secara langsung melakukan perubahan data penerima bantuan meskipun terdapat masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan bantuan tersebut.

4.8 Faktor Pendukung dan Penghambat

4.8.1 Faktor Pendukung

Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah didukung oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya komunikasi dan koordinasi antara pihak Kelurahan, RT, Dinas Sosial, serta pihak penyalur bantuan, di mana informasi mengenai penyaluran bantuan disampaikan kepada masyarakat melalui grup

WhatsApp RT sehingga warga dapat memahami proses penerimaan bantuan dengan lebih baik. Dengan begitu peran pihak kelurahan dan RT juga mendukung dalam pelaksanaan program karena pihak kelurahan berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat, sedangkan RT lebih memahami keadaan sosial ekonomi masyarakat di lingkungannya sehingga membantu penyampaian informasi dan pendampingan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan program bantuan sosial juga didukung oleh adanya dasar hukum dan kebijakan yang jelas yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan kelurahan dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya, meskipun penetapan penerima bantuan berada pada kewenangan pemerintah pusat. Dari sisi sumber daya ketersediaan aparatur kelurahan yang ada dinilai cukup mendukung proses administrasi dan koordinasi program bantuan sosial, walaupun jumlahnya terbatas, dengan dukungan RT sebagai perpanjangan tangan kelurahan di tingkat masyarakat. Dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor pendukung penting karena program bantuan sosial pada umumnya diterima dengan baik dan dirasakan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kebutuhan pangan sehingga menciptakan suasana yang relatif kondusif dalam pelaksanaan program. Selain itu, sistem penyaluran bantuan sosial juga langsung diberikan melalui pos penyalur dan diberikan kepada kelurahan agar diberikan kepada masyarakat yang termasuk dalam pendataan penerima bantuan sosial dengan begitu hal ini turut mendukung kelancaran penyaluran bantuan sehingga manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat penerima.

4.8.1 Faktor penghambat

Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah masih mengalami beberapa hambatan. Hambatan utama yang sering muncul adalah data penerima bantuan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga masih terdapat warga yang dianggap mampu menerima bantuan, sementara warga yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan sehingga menimbulkan keluhan dan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat. Kemudian hambatan lainnya adalah keterbatasan peran kelurahan dalam menentukan penerima bantuan karena pendataan dan penetapan penerima sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga kelurahan tidak dapat menyesuaikan data dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, keterbatasan jumlah aparatur kelurahan juga menjadi hambatan dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat terkait bantuan sosial. Ketidakteraturan waktu penyaluran bantuan turut menghambat pelaksanaan program karena membuat masyarakat bingung mengenai jadwal penerimaan bantuan. Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme dan ketentuan program bantuan sosial juga menjadi hambatan, karena masih ada warga yang belum memahami prosedur dan kriteria penerima bantuan. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial masih perlu diperbaiki agar dapat berjalan lebih tepat sasaran dan dirasakan lebih adil oleh masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan menggunakan indikator teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat di Kelurahan Loa Buah pada dasarnya telah berjalan, khususnya melalui penyampaian informasi dari kelurahan kepada RT dan selanjutnya kepada masyarakat menggunakan media *WhatsApp* dan pertemuan RT. Informasi mengenai jadwal penyaluran dan teknis pengambilan bantuan relatif mudah dipahami oleh sebagian besar masyarakat penerima. Namun masih terdapat masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial yang merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas, terutama terkait mekanisme penetapan penerima dan kewenangan kelurahan dalam pendataan dengan ini menunjukkan bahwa komunikasi sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya merata dan dipahami secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam pelaksanaan program bantuan sosial Di Kelurahan Loa Buah tergolong terbatas. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah aparatur kelurahan khususnya pada bidang kesejahteraan sosial masih kurang untuk menangani banyaknya penerima bantuan. Kelurahan juga tidak memiliki kewenangan dalam pendataan penerima bantuan sosial karena pendataan sepenuhnya dilakukan oleh pihak penyalur dan pemerintah pusat. Dari sisi fasilitas, kelurahan telah menyediakan sarana pendukung seperti ruangan dan peralatan administrasi yang cukup memadai untuk membantu proses penyaluran bantuan. Keterbatasan wewenang dan sumber daya ini mempengaruhi kemampuan kelurahan dalam memastikan ketepatan sasaran bantuan.

3. Disposisi

Sikap dan komitmen aparatur kelurahan serta RT dalam pelaksanaan program bantuan sosial pada umumnya dinilai cukup baik. Pihak kelurahan dan RT bersikap ramah, dan kooperatif, namun terdapat perbedaan pandangan dari masyarakat yang belum menerima bantuan sosial, yang menilai sikap aparatur kurang terbuka perbedaan pandangan ini dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan kelurahan karena pihak kelurahan hanya berperan sebagai pelaksana dalam proses penyerahan bantuan sosial sehingga kelurahan tidak dapat sepenuhnya menanggapi keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat di Kelurahan Loa Buah telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pembagian tugas antar lembaga sudah jelas, di mana pemerintah pusat dan dinas sosial berwenang dalam penetapan kebijakan dan penerima bantuan, pihak penyalur bertanggung jawab atas pendataan dan penyaluran, sedangkan kelurahan dan RT berperan sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat. Meskipun prosedur penyaluran relatif mudah dipahami oleh masyarakat penerima, struktur birokrasi yang bersifat hierarkis dan panjang menjadi kendala dalam penyelesaian permasalahan di lapangan, khususnya terkait ketepatan sasaran bantuan.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Loa Buah didukung oleh adanya koordinasi dan komunikasi yang cukup baik antara kelurahan, RT, pihak penyalur, dan dinas sosial. Peran RT sebagai penghubung langsung dengan masyarakat sangat membantu dalam penyampaian informasi dan pendampingan penerima bantuan. Selain itu, adanya dasar hukum dan kebijakan yang jelas menjadi pedoman dalam pelaksanaan program. Dukungan masyarakat penerima yang merasakan manfaat bantuan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan, juga turut menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial adalah ketidaktepatan data penerima bantuan, di mana masih terdapat masyarakat

yang dinilai mampu menerima bantuan, sementara masyarakat yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan bantuan. Keterbatasan kewenangan kelurahan dalam pendataan dan penetapan penerima bantuan menjadi hambatan serius dalam menyesuaikan data dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, keterbatasan jumlah aparatur kelurahan, ketidakteraturan waktu penyaluran bantuan, serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme dan kriteria penerima bantuan turut menghambat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Kelurahan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi kepada masyarakat terkait mekanisme penetapan penerima bantuan sosial serta keterbatasan kewenangan yang dimiliki. Penyampaian informasi tidak hanya dilakukan melalui RT, tetapi juga dapat melalui media lain seperti papan pengumuman dan forum pertemuan agar informasi dapat diterima secara merata oleh masyarakat. Selain itu, kelurahan perlu lebih aktif dalam memberikan masukan terkait data calon penerima bantuan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Penguatan sumber daya manusia juga perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat.
- b. Pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan validitas data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran

dan perlu adanya ruang koordinasi yang lebih luas dengan pihak kelurahan dan RT dalam proses validasi data, bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi masyarakat di lapangan. Pemerintah pusat juga perlu memastikan konsistensi jadwal penyaluran bantuan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

c. Ketua RT juga perlu meningkatkan perannya dalam menyampaikan informasi terkait program bantuan sosial secara jelas dan menyeluruh kepada masyarakat. Peran RT sebagai penghubung antara masyarakat dan kelurahan perlu terus diperkuat, terutama dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun usulan dari masyarakat.

d. Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme dan kriteria penerima bantuan sosial sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mencari informasi serta ikut mengawasi proses penyaluran bantuan agar berjalan secara transparan dan adil. Masyarakat juga diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan sosial tetapi dapat berupaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- ABDUL WAHAB, SOLICHIN. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- ABU B. RIFA'I. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- ACHMAD. (2024). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta:
- ANDI PRASTOWO. (2016). *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- ANGGRASARI, D. (2022). *Analisis Efektivitas Bantuan Sosial Tunai terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin*. Yogyakarta: Deepublish.
- ARDAH. (2022). *Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- BUDI WINARNO. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.
- DEDDY MULYADI. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung.
- _____. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- DEGO SUPRAYINTO. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- DESTRI BUDI RETNANINGSIH. (2020). *Hukum Perlindungan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- DEY, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.
- EDI SUHARTO. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Aditama.
- FATHOR RASYID. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode dan Praktek*. Yogyakarta: IAIN Kediri Press.
- DEDDY MULYADI (2015:30). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

- INDAHONO, D. (2017). *Kebijakan Publik: Teori, Analisis, dan Proses*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HARBANI PASOLONG. (2017). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- H. TACHJAN. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: AIPI.
- HUSAINI USMAN & PURNOMO SETIADY AKBAR. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- KAELLEN. (2015). *Manfaat Penelitian Dalam Kehidupan Manusia*. Yogyakarta: Garha Ilmu.
- KAHAR MUZAKKIR. (2022). *Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius.
- KERLINGER, F. N. (2006). *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- LENGKAI. (2020). *Kebijakan Publik dan Implementasi*. Jakarta:
- LEXY J. MOLEONG. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- MATTHEW B. MILES, & MICHAEL HUBERMAN, A. MICHAEL. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- MUHAMMAD IBRAHIM. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- MUHAMMAD IDRUS. (2019). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: UII Press.
- MUHAMMAD IRFAN ISLAMY. (2017). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- MUHAMMAD SAWIR. (2012). *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik: Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- NAWAWI, HADARI. (2017). *Kebijakan Publik dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- P. JAMES SPRADLEY. (2017). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- RATNA, N. K. DALAM AHMADI, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

RIANTO. (2016). *Pengantar Konsep dan Paradigma Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.

SOBIRIN. (2023). *Implementasi Kebijakan*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia.

SUARTINI. (2023). *Kebijakan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

SUGIYONO. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

SUHARSIMI ARIKUNTO. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

TANGKILISAN, H. N. S. (2018). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.

WIERSMA, W. (1995). *Research Methods in Education*. Boston: Allyn and Bacon.

TANGKILISAN, H. N. S. (2018). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.

JURNAL:

SUJARWENI, V. WIRATNA. (2014). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

SUTMASA, YOSEP GEDE. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4.1 (2021): 25-36.

SYATA, W. M. (2025). *Efektifitas Program Bantuan Sosial Dalam Mengurangi Kemiskinan*. Bandung: Journal Insight Press.

HARTINI RETNANINGSIH. (2020). *Bantuan Sosial Bagi Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah*. Jurnal Masalah-Masalah Sosial.

MAYIDI REJCHIES MANURUN, H.M.Z ARIFIN, TRISNA WATY RIZA ERYANI AHMAD YANI. (2025). *Optimizing Non-Cash Food Assistance Programs through Analysis of Supporting Factors and Obstacles*.

DOKUMEN / PERATURAN

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perum Bulog

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Permensos Nomor 4 Tahun 2023 tentang Program Sembako

Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

LAMPIRAN



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tira Agustinus
NPM : 2263201023
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Drs. Said Zulkifli, M.Si
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

Judul Skripsi :
Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat di Kelurahan
Lon Buah Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda

Dosen Pembimbing (I / II)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	3/25/11	1. Ace judul 2. Perbaiki Analisis 3. Perbaiki DAPUS 4. A		
	06/25/11	1. Ace Penelitian		
	27/25/11	1. Ace Kesimpulan 2. Boleh Penelitian Secukupnya		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4.	25/02 2020	Acc Penilaian.		
				
				



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tira Agustinus
NPM : 2263201023
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Drs. Said Zulkifli, M.Si
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

Judul Skripsi :

Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat di Kelurahan
Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Dosen Pembimbing (I/II)

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1	6/11 2025	Acc Judul BAB I, II, III		
2	10/11 2025	Pengisian kata dalam judul Margin 4 4 3 3 lengkapi kata pengantar latar belakang kibitki		
3	10/11 2025	3 pendapat Para ahli kerangka pikir Definisi konseptual cek Daftar Pustaka For cek plagiasi 30/20		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4.	20/11 2025	Margin latar belakang ditambahkan lengkapi cover, ringkasan, kata pengantar		
5.	24/11 2025	Fokus bantuan sosial latar belakang ditambahkan		
6.	24/11 2025	Rekomendasi Laporan		
7.	25/02 2025	- Gambar di lampiran sertakan no dan sumber peneliti. - Ringkasan perbaikan. - riwayat hidup lengkapi - reduksi kecilin - tabel bersambung bab IV - format		
8.	25/02 2025	- komunikasi tambahkan berdasarkan hasil wawancara - pengantar		
9.	27/02/26.	- lampiran diperbaiki - Gambar revisi data dikucilkan - foto di riwayat hidup dibersihkan		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
10.	02/03 2025	- Rumusan masalah kendala di bagian Leah diganti - Bahasa asing dicetak miring - Lampiran dibedakan - Tambahkan keterangan disamping		
11.	02/03 2025	ACC Usm Baku		



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

BK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0396/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
BK BAN-PT NO: 4618/BK/BAN-PT/IAK-PNB/S/VI/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 05 December 2025

Nomor : 599/UWGM-FISIP/AK/XII/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Lurah Loa Buah
Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
Di-

Tempat
Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara, kiranya bersedia menerima mahasiswa/i, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Tira Agustinus
N P M : 2263201023
Program Studi : Administrasi Publik

Mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Kantor Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, untuk memperoleh informasi dan data-data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

"IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN LOA BUAH KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA"

Berkaitan dengan hal ini, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, membantu mahasiswa kami memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik dalam hal ini disampaikan terima kasih.

Dik a n,

Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P.
NIP. 2023.070.326

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 716572
Email : uwgama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi**

Kampus Biru UWGM
Rektorat - Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN LOA BUAH**

Jalan Plamboyan RT 17 Telp.(0541) 6276138 SAMARINDA
Website : <https://kel-loa-buah.samarindakota.go.id> Email : kel.loabuah@gmail.com

Samarinda, 15 Desember 2025

Nomor : 400.14.5.1/0999/400.08.002
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Widya Gama Mahakam Samarinda
C.q Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
di -
tempat.

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widya Gama Mahakam Samarinda dengan nomor: 599/UWGM-FISIP/AK/XII/2025 tertanggal 05 Desember 2025, perihal permohonan izin penelitian di Kantor Kelurahan Loa Buah, bersama ini kami sampaikan bahwa Kelurahan Loa Buah memberikan izin kepada mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widya Gama Mahakam Samarinda untuk melaksanakan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud.

Demikian surat balasan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Sdih,
Budi Hartono, S.Sos
Penata Tingkat I / III d
NIP.19751216 2000121 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat Jalan Balaikota No. 27 Telepon (0541) 733033 Fax (0541) 741429
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75121
<http://Kesbangpol.samarindakota.go.id/> Email : kesbangpol.samarindakota@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

200.1.4.12/ 1662 /300.05

A. Dasar :

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

B. Menimbang :

Surat dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor : 583/UWGM-FISIP/AK/XII/2025 Tanggal : 01 Desember 2025
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :

- A. Nama / Obyek : **TIRA AGUSTINUS**
B. NIM : 2263201023
C. Jurusan / Program Studi : Administrasi Publik
D. Jabatan / Tempat / Identitas :

Mahasiswa/, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim, No. 28 RT. 08 Samarinda 75119, NIK: 6406064204040001, Hp :-

E. Untuk...



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E, BSSN





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat Jalan Balaikota No. 27 Telepon (0541) 733033 Fax (0541) 741429
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75121
<http://Kesbangpol.samarindakota.go.id/> Email : kesbangpol.samarindakota@gmail.com

E. Untuk :

1. Melaksanakan Penelitian Dengan Judul "*Implementasi Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat di Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*"
2. Lokasi Penelitian :
 - Kelurahan Loa Buah Samarinda
3. Waktu Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
4. Status Penelitian : Baru

Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. *Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;*

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 03 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan,

YOSUA LADEN, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19830525 200112 1 003

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://stev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 1F5B1-2025-16-60-300-05

Tembusan :

1. Wali kota Samarinda (sebagai laporan);
2. Lurah Loa Buah Samarinda;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR, BSSN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1. Wawancara Dengan Bapak Budi Hartono, S.Sos Selaku Lurah Kelurahan Loa Buah



Sumber : Dokumentasi Wawancara 16 Desember 2025

Gambar 2. Wawancara Bersama Kasi Kesra Ibu Eka Handayani, S.Amd.,S.Pd.



Sumber : Dokumentasi Wawancara 16 Desember 2025

Gambar 3. Wawancara Bersama Ketua RT. 12 Ibu Bintang Ayu Candra



Sumber : Dokumentasi Wawancara 16 Desember 2025

Gambar 4. Wawancara Dengan Ibu Nurlailah Selaku Masyarakat Penerima Bantuan Sosial



Sumber : Dokementasi Wawancara 17 Desember 2025

Gambar 5. Wawancara Dengan Ibu Hamlinah Selaku Masyarakat Penerima Bantuan Sosial



Sumber : Dokumentasi Wawancara 17 Desember 2025

Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Agustina selaku masyarakat tidak menerima bantuan sosial.



Sumber : Dokumentasi Wawancara 18 Desember 2025

Gambar 7. Wawancara Dengan Ibu Nurdiana Selaku Masyarakat Tidak Menerima Bantuan Sosial



Sumber : Dokumentasi Wawancara 18 Desember 2025

Gambar 8. Beras Bulog



Sumber : Dokumentasi Tempat Penampungan Bantuan sosial Bulog di Kelurahan Loa Buah 2025

Gambar 9. Minyak Goreng



Sumber : Pengemasan Minyak Goreng Di Kelurahan Loa Buah 2025

Gambar 10. Pengambilan Bantuan Sosial Bulog



Sumber : Dokumentasi Pengambilan Bantuan Sosial Di Kelurahan Loa Buah 2025